



LAPORAN KINERJA

2021



BIRO PERENCANAAN

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

Kinerja Tapak
Melambungkan Kinerja KLHK

KESINAMBUNGAN TEMA PEMBANGUNAN

2020

Melabuhkan geliat tapak ke dalam perbaikan kinerja

Pandemi yang melanda dunia, mengajarkan kita betapa sebuah perubahan adalah keniscayaan. Sedari awal, Biro Perencanaan bertekad memanfaatkan gelombang pandemi ini sebagai pendulum perubahan. Karenanya, niat kami untuk memodernisasi akuntabilitas kinerja seperti menemukan momentum perubahan : membawa geliat tapak ke dalam perbaikan bilangan kinerja.



2019

Mendukung pemenuhan prioritas nasional dan mendorong geliatnya di tingkat tapak.

Biro Perencanaan senantiasa mendorong setiap rupiah yang dibelanjakan untuk mendukung pemenuhan visi-misi Presiden Republik Indonesia, dan membawa arti yang mendalam bagi perbaikan tapak, mengungkit ekonomi masyarakat sekitar hutan dan membantu merawat hubungan antara manusia dengan sumberdaya.



Foto oleh Ineke Tya Claudya Sarwono Putri
Sungai Batang Antokan, Padang

Air keluaran sungai Danau Maninjau memiliki peran strategis sebagai pembangkit listrik tenaga air, irigasi, dan sumber air baku.

LAPORAN KINERJA 2021

BIRO PERENCANAAN

Disusun dan diterbitkan oleh Biro Perencanaan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

ISBN 978-623-96048-3-7

Biro Perencanaan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak berikut ini yang telah menyumbangkan foto-foto untuk menghiasi Laporan Kinerja ini. Mereka adalah (diurut sesuai abjad):

Agus Triyana (BTN Ujung Kulon)
Aisha Kemala Wijayanti (Biro Perencanaan)
Ajian Yogo Pratopo (Biro Perencanaan)
Akbar Sumitro (BKSDA Papua Barat)
Amaliah Kurniasih (Biro Perencanaan)
Anny Meilani (Biro Perencanaan)
Arfan Adhi Kurniawan (Biro Perencanaan)
Ari Iswandari (BTN Gunung Leuser)
Cindy Caesarah (Biro Perencanaan)
Daffa Ulhaq Adabi
Erwin Febrianto (BTN Tambora)
Fata Perdana (BTN Wakatobi)
Fatah (BPDASHL Pemali Jratun)
Heri Andri (BTN Matalawa)
Ineke Tya Claudya Sarwono Putri (Biro Perencanaan)
Lastri Simanjuntak (Biro Perencanaan)
Mahardhika Cahaya Utama (Biro Perencanaan)
Marwedhi Nurratyo (Biro Perencanaan)
M Desby Aditia (Biro Perencanaan)
Much Syachrir (BTN Bantimurung Bulusaraung)
Muhayar (Biro Perencanaan)
Mustofa Bisri (Biro Perencanaan)
Panji Prakoso (Biro Perencanaan)
Raden Firman Santoso (Biro Perencanaan)
Yunita Aprilia (BTN Gunung Leuser)

Foto sampul merupakan sebuah potret rusa sambar jantan dewasa yang gagah disertai tanduk dan surai yang megah, kemegahan tersebut menggambarkan Biro Perencanaan. Foto tersebut diambil oleh Yayan Istyan.



Dokumen ini dapat diunduh melalui tautan:
<https://bit.ly/LKJRocan-2021>

©copyright Biro Perencanaan 2021





Foto oleh Fata Perdana
BTN Wakatobi_Fata Perdana Pasaribu, SP_Keluarga Kecil Nelayan
sebuah keluarga kecil yang menggunakan perahu untuk mencari ikan.
Berdasarkan informasi yang kami dapat dari sang ayah (Kepala Keluarga) bahwa
mereka mendayung perahu sejauh ± 5 Km untuk menuju lokasi tersebut dengan
bekal makanan dan minum seadanya. Berdasarkan hal tersebut dapat dipetik
berbagai macam pelajaran hidup khususnya tentang rasa syukur atas kehidupan
yang dijalani saat ini.

IKHTISAR EKSEKUTIF



Vektor oleh M Desby Aditia
Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik selalu diawali dengan kegiatan perencanaan. Salah satu komponen perencanaan tersebut adalah data primer yang dikumpulkan dari tingkat tapak.

97,2%

Nilai kinerja Biro Perencanaan

92,23%

Realisasi anggaran untuk memenuhi sasaran yang diperjanjikan. Realisasi anggaran keseluruhan termasuk dengan pelaksanaan hibah luar negeri sebesar 68,82 persen

0,95

Efisiensi penggunaan anggaran Biro Perencanaan. Sebagai catatan, angka efisiensi kurang dari angka 1 menunjukkan bahwa penggunaan anggaran efektif untuk memenuhi sasaran.

Biro Perencanaan memiliki nilai kinerja sebesar 97,2% angka ini merupakan rerata dari capaian kedua indikator kinerja kegiatan (IKK) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2021, sedangkan nilai efisiensi sebesar 0,95 Dengan realisasi anggaran 92,23 %

Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan sebesar 3,9 Poin dari target sebesar 4 Poin dengan capaian sebesar 97,5 Poin

Capaian kinerja Biro Perencanaan ini dibentuk dari beberapa komponen yang merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan, dokumen penganggaran, dokumen Kerjasama dalam negeri dan hibah, dan meningkatkan evaluasi dan pelaporan.

Kinerja Biro Perencanaan dalam kurun waktu 2021 pengukurannya dapat ditelusuri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2021. Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan adalah: (1) Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan sebesar 4 Poin; (2) Nilai SAKIP KLHK sebesar 74 Poin.

Hasil capaian kinerja Biro Perencanaan tahun 2021 sebesar 97,2% sedangkan realisasi anggaran keseluruhan sebesar 92,23 %. Namun, apabila realisasi anggaran dihitung tanpa HLN. Maka, Biro Perencanaan memiliki persentase realisasi sebesar 99,37%.

Dari capaian 2 indikator tersebut, selanjutnya menentukan seberapa efisien anggaran yang digunakan dalam kurun waktu tersebut. Angka efisiensi anggaran ini diperoleh dengan membandingkan presentase capaian kinerja dengan realisasi anggaran sehingga diperoleh nilai efisiensi sebesar 0,95

Untuk nilai efisiensi, apabila angka kurang dari 1 (satu) termasuk efisien. Tingkat efisiensi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran Biro Perencanaan efisien terhadap capaian.



Foto oleh Ari Iswandari

Pusat Latihan Satwa Khusus (PLSK) Tangkahan, Taman Nasional (TN) Gunung Leuser
Bonni, anak gajah sumatera yang lahir pada Senin 1 Februari 2021 dari gajah betina
Sari dan gajah jantan Theo

KALEIDOSKOP

2021

KALEIDOSKOP 2021

JANUARI



Laporan Kinerja
Biro Perencanaan
Tahun 2020 selesai
disusun



Laporan Kinerja
Sekretariat Jenderal
Tahun 2020 selesai
disusun

FEBRUARI



Pembahasan RKP 2022
bersama seluruh UKE I



Laporan Kinerja
Kementerian LHK
Tahun 2020 selesai
disusun

Kompetisi Video
Storytelling Gender

Laporan DAK
selesai disusun

MARET

MEI

Rapat
Persiapan
pertemuan 3
pihak pagu
indikatif KLHK



Sosialisasi DBH DR TA 2021
dan Pembahasan
Rekonsiliasi Perhitungan
Sisa DBH DR TA 2020

APRIL



Launching Sistem
Pembelajaran Gender

BA Hasil
Kesepakatan
Pertemuan Tiga
Pihak
Pembahasan
Renja KLHK
2021

Pembahasan Penyusunan
Rancangan Awal Renja
KLHK Tahun 2022

JUNI

Bahan Pidato
Kenegaraan
dan Bahan
lampid
disusun

Deadlock RKP

PK Setjen 2020
Revisi

PK Rocan
2020 Revisi

JULI

Penelitian
RKA KL pagu
anggaran
KLHK TA 2021



BIRO PERENCANAAN

SEPTEMBER

Rapat Kerja dan
Rapat Dengar
Pendapat Komisi IV
DPR RI

Jurnal Perempuan
bersama The Asia
Foundation dan
Yayasan Jurnal
Perempuan

Rencana kerja
Biro
Perencanaan
2022



Entry meeting
penilaian RB
dan SAKIP 2019



Penyusunan BA
Penelaahan
Renstra KLHK
Tahun 2020-
2024

Pembahasan Rancangan Kegiatan
dan Penganggaran Dana Bagi
Hasil (DBH) Dana Reboisasi TA
2022



DESEMBER

Rencana Kerja
Biro Perencanaan



Rencana kerja
Setjen tahun
2022

Perjanjian
Kinerja Menteri
LHK dan Eselon
I lingkup KLHK
Tahun 2022

Rencana Aksi
Perjanjian
Kinerja Tahun
2022

Rencana Kerja
KLHK Tahun
2022

Pekan
Ecogender dan
PESTA

FGD KLHK
dengan Komisi
IV DPR RI

Penyerahan DIPA dan
Penandatanganan PK
KLHK 2022



OKTOBER

Penelaahan Perubahan
Rencana Strategis KLHK
Tahun 2020-2024 dan
updating Rencana
Strategis KLHK 2020-
2024

Penelitian RKAKL
TA 2022



NOVEMBER

AGUSTUS

Praktek Baik Ibu
Bumi dalam
Mengelola Hutan

bersama dengan
The Asia
Foundation

KATA PENGANTAR

Kepala Biro Perencanaan



Puji Syukur Alhamdulillahirobbil Alamiin, Kami panjatkan Kehadirat Illahi Robbi Berkat Karunia-Nya Laporan Kinerja Biro Perencanaan 2021 telah selesai disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja/ Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar peraturan tersebut, Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran strategis dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Substansi materi yang termuat dalam laporan ini, secara umum memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Biro Perencanaan selama Tahun 2021. Capaian Kinerja Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja Biro Perencanaan. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik perbaikan dan peningkatan kinerja Biro Perencanaan secara berkelanjutan.

Sesuai arahan Bapak Presiden, yang kerap sekali menekankan bahwa birokrasi harus bekerja dengan memanfaatkan anggaran dengan efektif dan efisien, di tengah semakin banyaknya kebutuhan pembangunan. Dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), instansi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Tahun 2021 merupakan capaian tahun ke-dua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, dimana pada tahun 2021 memiliki tema Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial yang merupakan aksi cepat pemerintah dalam membangun Indonesia dari dampak pandemik Covid-19. Semangat yang dibangun dalam pelaksanaan pembangunan di Tahun 2021 adalah dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial.

Pada tahun 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung pembangunan melalui strategi Prioritas Nasional 1 (Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan), Prioritas Nasional 2 (Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan), Prioritas Nasional 3 (Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing), dan Prioritas Nasional 6 (Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim).



Foto oleh Fata Perdana
Foto diambil ketika berada pada *safety stop* sebelum naik ke permukaan. Pada kondisi ini penyelam wajib berhenti sejenak di kedalaman 5 meter selama ± 5 menit untuk menetralkan kadar nitrogen di dalam tubuh penyelam. Pada kedalaman ini akan banyak ditemukan berbagai macam spesies ikan hias karang dengan berbagai macam bentuk dan warna. Salah satu ikan yang paling menarik perhatian pada kondisi kedalaman tersebut adalah Clark's anemonefish yaitu sejenis ikan badut (*clownfish*) yang tinggal di antara anemon.

Pelaksanaan pembangunan KLHK di tahun 2021 dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*). Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan (1) menjaga kesinambungan melalui penyesuaian Prioritas Nasional dengan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Major Project (MP), (3) menjadikan konsep pengembangan wilayah sebagai basis dalam pelaksanaan PP dan KP, serta (4) mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan pembangunan serta sinergi dan keterpaduan pelaksanaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Akhirnya, semoga Allah SWT. Melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua, dan semoga apa yang kami lakukan di tahun 2021 memberikan iuran bagi perbaikan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, 19 Januari 2022

Kepala Biro Perencanaan,



Dr. Ir. Apik Karyana, M.Sc.
NIP. 19630720 199003 1 001



BIRO PERENCANAAN

DAFTAR ISI

Halaman Kolofon	iii
Ikhtisar Eksekutif	v
Kaleidoskop	viii
Kata Pengantar	xi

01

Pendahuluan

Pendahuluan	1
Struktur Organisasi	3
Total Pegawai	5
Struktur SDM	9

Perencanaan Kinerja



02

Rencana Strategis 2020–2024	11
Rencana Kerja 2021	12
Perjanjian Kinerja 2021	13

03

Akuntabilitas Kinerja

IKK 1 (Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan)	15
IKK 2 (Nilai SAKIP KLHK)	24
Trend Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran 2016–2021	34
Pagu dan Realisasi	35
Trend Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran TA. 2021	36

Penutup

Penutup

38



LAMPIRAN

Pengarusutamaan TPB/SDGS 2021	41
Koordinasi dan Pengelolaan DAK	44
Pengarusutamaan Gender	46
Kerjasama Dalam Negeri	49
Capaian Forclime TA 2021	52
Perjanjian Kinerja Bagian	55
Profil Surat Masuk TA 2021	58
Sebaran Surat per Bulan TA 2021	59
Indeks Kepuasan TU TA 2021	60

PENDAHULUAN



Foto oleh Mahardhika Cahaya Utama

01

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Biro Perencanaan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Biro Perencanaan atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja ini juga merupakan ikhtisar kinerja yang meliputi nilai kinerja, realisasi anggaran, dan efisiensi kinerja. Nilai kinerja tersebut didapatkan pada rerata dari masing-masing capaian IKK (Indeks Kinerja Kegiatan) dalam bentuk persentase. Sedangkan efisiensi kinerja diperoleh berdasarkan hasil nilai kinerja dibagi dengan persentase realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja Biro Perencanaan tahun 2021 ini dibuat dengan menyajikan serangkaian keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian rencana, tindakan dan kegiatan atas perencanaan dan perjanjian kinerja Biro Perencanaan dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional melalui program Reformasi Birokrasi. Laporan kinerja Biro Perencanaan tahun 2021 ini juga menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja tahun 2021. Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Perencanaan untuk meningkatkan kinerjanya.

Biro Perencanaan memiliki tugas dan fungsi yaitu: (a) Melaksanakan koordinasi dan integrasi penyusunan bahan rencana program, kegiatan, dan anggaran Kementerian; (b) Melaksanakan pengelolaan Kerjasama dalam negeri; (c) Melaksanakan koordinasi dan integrasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dana transfer ke daerah dan hibah; (d) Melaksanakan koordinasi dan harmonisasi pemantauan dan Evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan; (e) Menyiapkan koordinasi Kerjasama dalam negeri dan pengelolaan hibah; (f) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga biro.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan tersebut, Biro Perencanaan memiliki tantangan untuk mendekatkan jarak antara perencanaan dan kebutuhan tapak untuk menjawab isu-isu pembangunan negeri. Menyelaraskan kebijakan pembangunan nasional dengan pembangunan bidang LHK serta menjembatani kebijakan tersebut dengan kebutuhan tapak.

Laporan kinerja merupakan ikhtisar penjelasan ringkas tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja dan memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), didasarkan pada Perjanjian Kinerja yang telah disepakati, maka disusunlah Laporan Kinerja Lingkup Biro Perencanaan Tahun 2021.

STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN

Pada tanggal 1 Juli 2021, Ibu Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar telah menyetujui Peraturan Menteri No. 15 tahun 2021 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang dibentuk sebagai upaya pencapaian dari fokus kerja pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Biro Perencanaan sesuai dengan SOTK terbaru mengalami transformasi jumlah bagian serta peralihan pejabat Eselon IV menjadi pemegang jabatan fungsional.



Perencanaan setelah rancangan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) baru disahkan adalah :

1. Pelaksanaan koordinasi dan integrasi penyusunan bahan rencana program, kegiatan, dan anggaran Kementerian
2. Pelaksanaan pengelolaan Kerjasama dalam negeri
3. Pelaksanaan koordinasi dan integrasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dana transfer ke daerah dan hibah
4. Pelaksanaan koordinasi dan harmonisasi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan
5. Penyiapan koordinasi Kerjasama dalam negeri dan pengelolaan hibah
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro

Sebelum menggunakan SOTK sesuai dengan Peraturan Menteri No. 15 tahun 2021, Biro Perencanaan memiliki tugas untuk melakukan persiapan koordinasi dalam penyusunan bahan-bahan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan, koordinasi program anggaran dan kerja sama dalam negeri dan hibah luar negeri menurut mandat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 18/MENLHK-II/2015.

Dari struktur organisasi yang sebelumnya, untuk bagian Rencana Program dan bagian Penyusunan Anggaran melebur menjadi Bagian Rencana, Program, dan Anggaran. Serta untuk bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hibah bergabung dengan Evaluasi menjadi Bagian Pengelolaan Kinerja yang juga membawahi sub bagian Tata Usaha.

1. Bagian Rencana, Program, dan Anggaran

Pada bagian ini melebur untuk tugas dan fungsi dari Bagian Rencana Program dan Bagian Penyusunan Anggaran. Adapun tugas yang diampu adalah melaksanakan koordinasi dan integrasi penyusunan bahan rencana program, kegiatan, dan anggaran kementerian, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dana transfer ke daerah dan hibah.

2. Bagian Pengelolaan Kinerja

Untuk bagian ini mengampu tugas yaitu melaksanakan koordinasi dan harmonisasi pemantauan dan Evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, penyiapan koordinasi dan pengelolaan Kerjasama dalam negeri, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Penyesuaian perubahan struktur organisasi Biro Perencanaan diperkirakan akan berlangsung sampai akhir tahun 2021. Diharapkan kedepannya agar Biro Perencanaan dapat memberikan pelayanan perencanaan secara efektif dan terstruktur menjadi pelayanan satu pintu sesuai tupoksi bagian masing-masing.

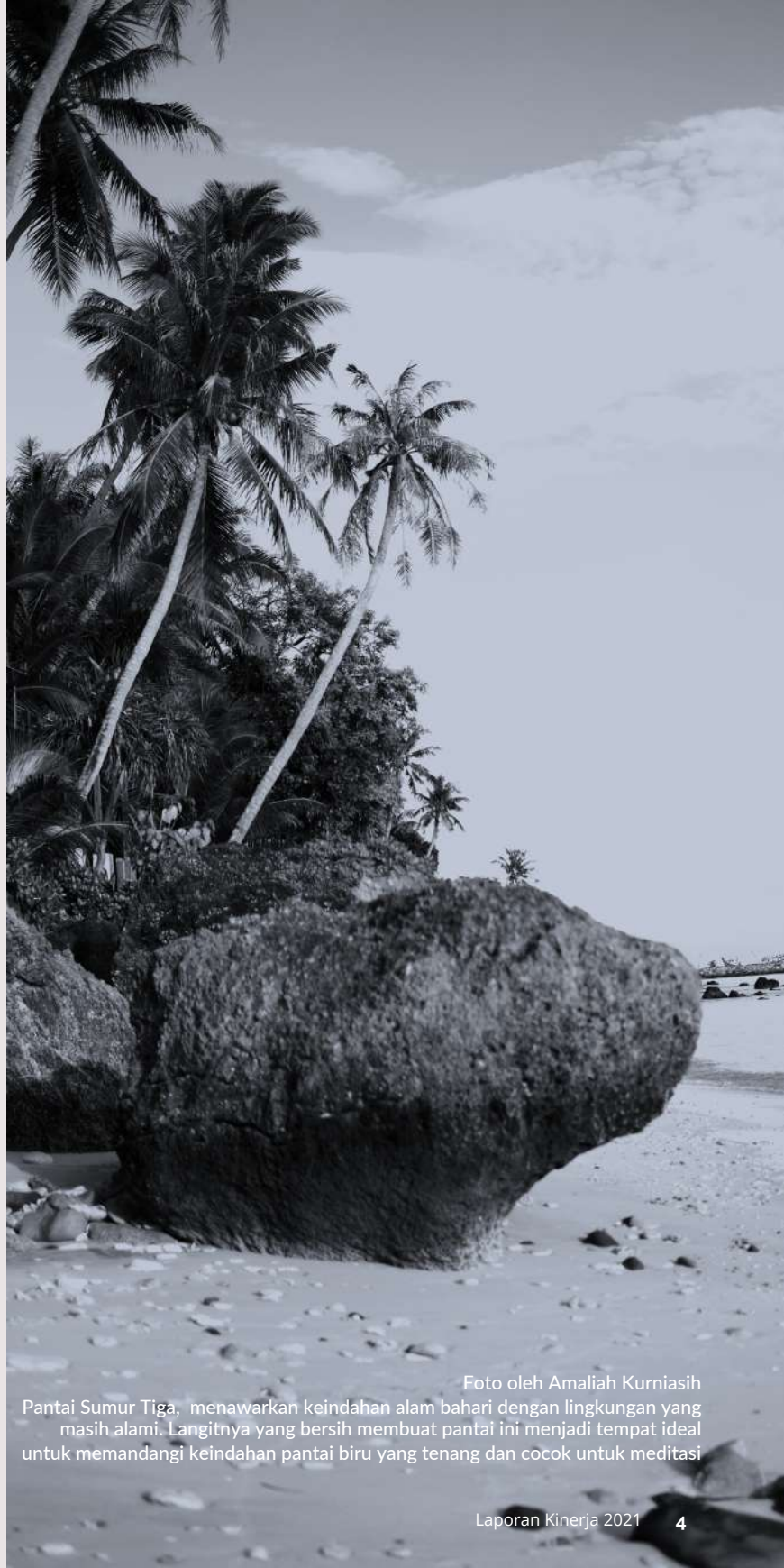
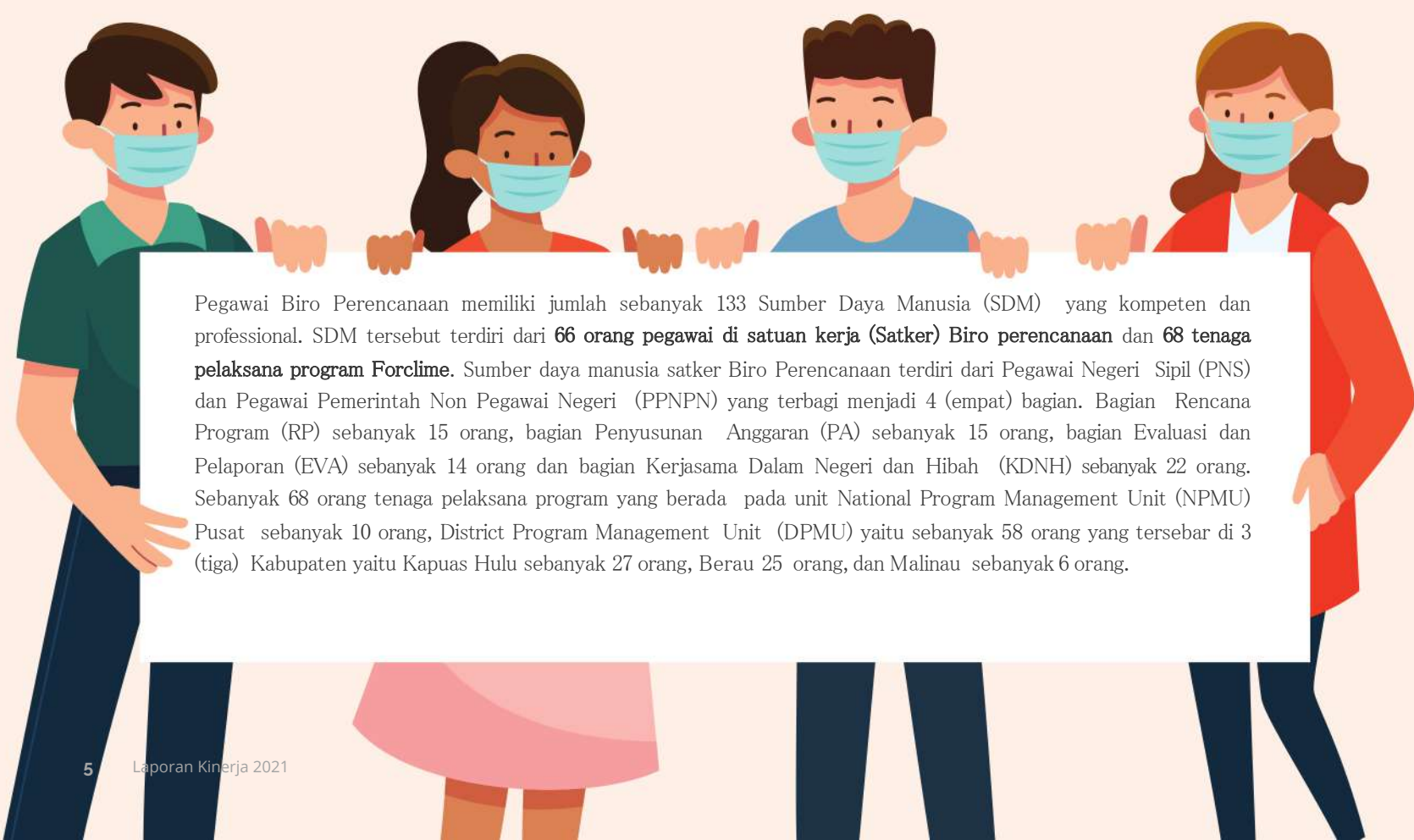


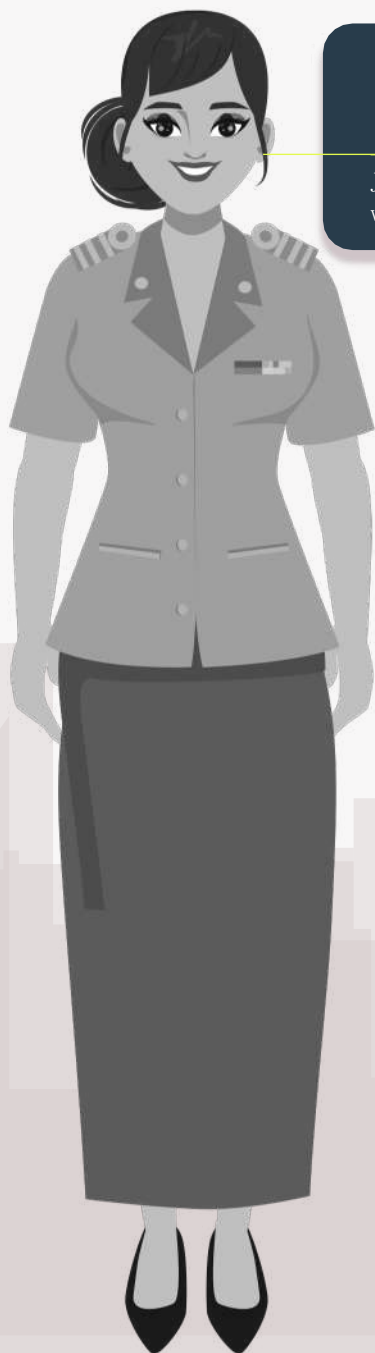
Foto oleh Amaliah Kurniasih
Pantai Sumur Tiga, menawarkan keindahan alam bahari dengan lingkungan yang masih alami. Langitnya yang bersih membuat pantai ini menjadi tempat ideal untuk memandangi keindahan pantai biru yang tenang dan cocok untuk meditasi

TOTAL PEGAWAI BIRO PERENCANAAN

134 PEGAWAI

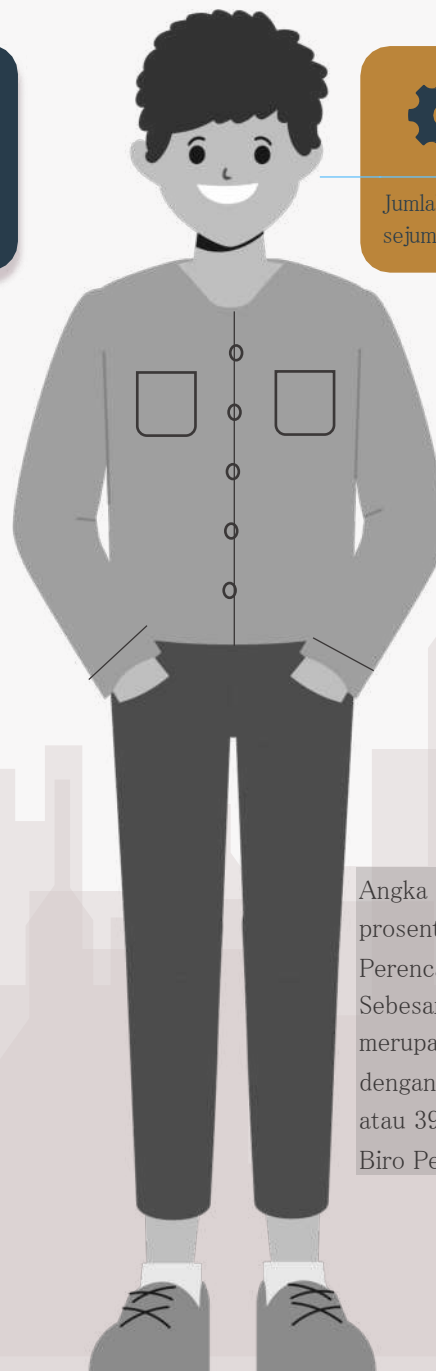
An illustration of four people (two men and two women) wearing light blue face masks. They are holding a large white rectangular sign in front of them. The background is a solid light orange color. The people are wearing various colored clothing: a green shirt, a red top, a blue shirt, and a red jacket. The sign contains text about the staff of the Planning Office.

Pegawai Biro Perencanaan memiliki jumlah sebanyak 133 Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan professional. SDM tersebut terdiri dari **66 orang pegawai di satuan kerja (Satker) Biro perencanaan** dan **68 tenaga pelaksana program Forclime**. Sumber daya manusia satker Biro Perencanaan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang terbagi menjadi 4 (empat) bagian. Bagian Rencana Program (RP) sebanyak 15 orang, bagian Penyusunan Anggaran (PA) sebanyak 15 orang, bagian Evaluasi dan Pelaporan (EVA) sebanyak 14 orang dan bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hibah (KDNH) sebanyak 22 orang. Sebanyak 68 orang tenaga pelaksana program yang berada pada unit National Program Management Unit (NPMU) Pusat sebanyak 10 orang, District Program Management Unit (DPMU) yaitu sebanyak 58 orang yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kapuas Hulu sebanyak 27 orang, Berau 25 orang, dan Malinau sebanyak 6 orang.



29,1%

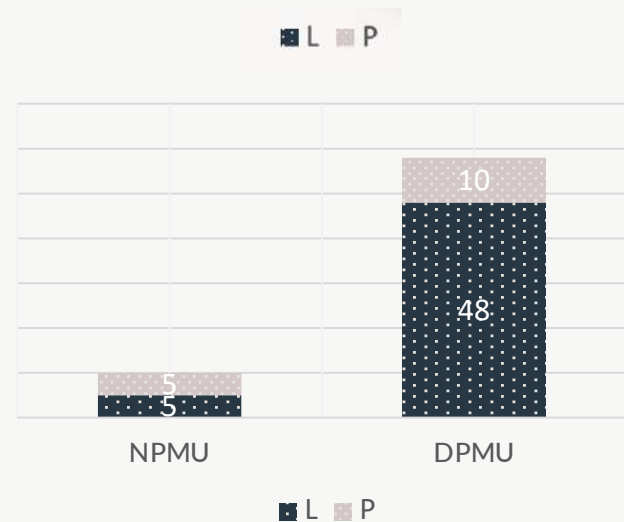
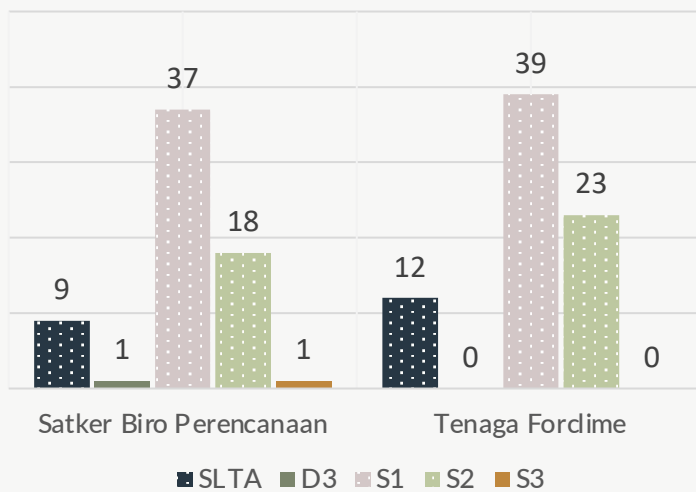
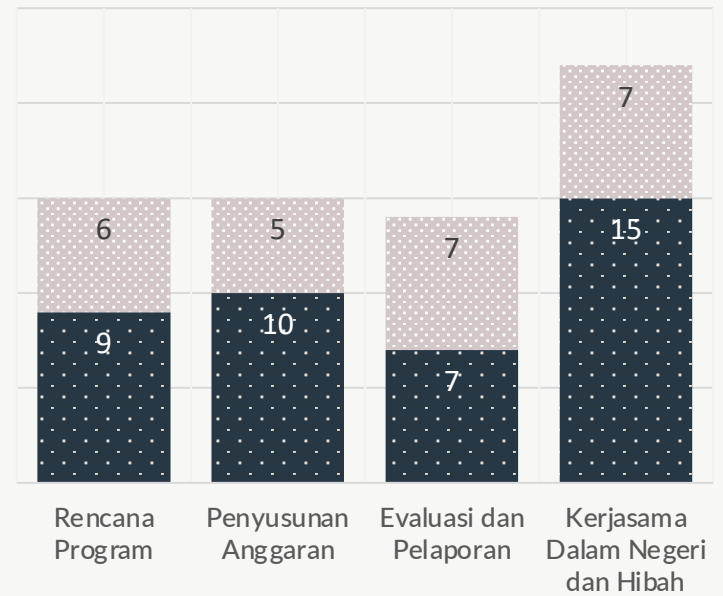
Jumlah pegawai Biro Perencanaan
wanita sejumlah 39 orang



70,9%

Jumlah pegawai Biro Perencanaan pria
sejumlah 95 orang

Angka diatas menunjukkan hasil prosentase klasifikasi pegawai Biro Perencanaan berdasarkan jenis kelamin. Sebesar 70,9% atau 95 orang mayoritas merupakan pegawai laki-laki disusul dengan pegawai wanita sebesar 29,1% atau 39 orang dari total seluruh pegawai Biro Perencanaan sebanyak 134 orang.



“Jumlah pegawai Biro Perencanaan baik dari Satker Biro Perencanaan dan Tenaga Forclime paling banyak adalah berjenis kelamin laki-laki dan dengan tingkat Pendidikan S1”



Foto oleh Cindy Caesarah

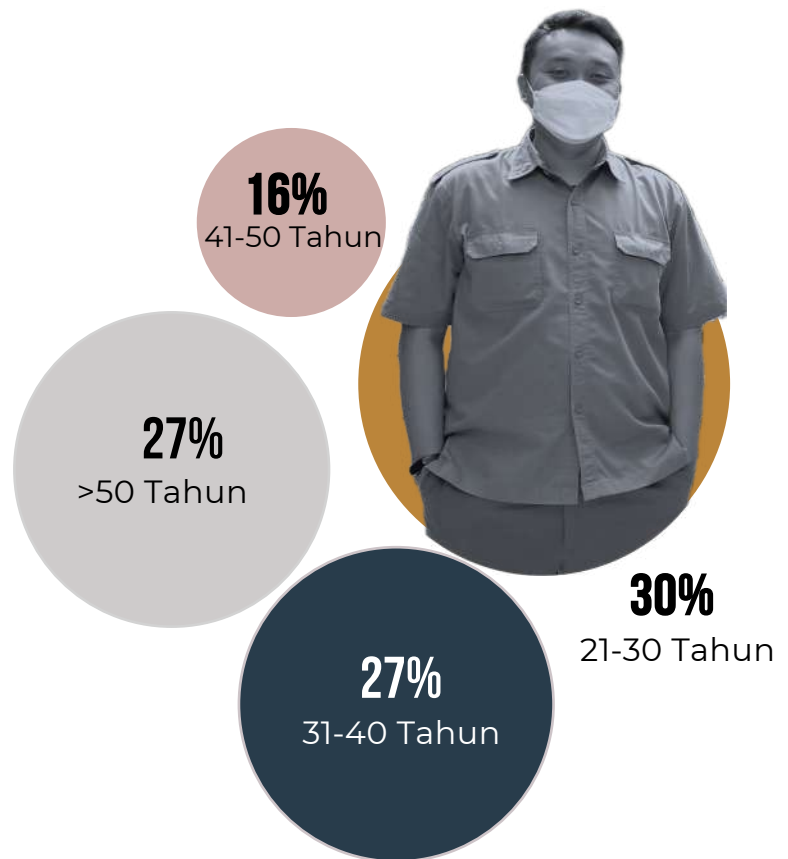
Ekowisata Mangrove Desa Gampong Baro Sayeng, Kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya

Ekowisata Mangrove Sayeung Park yang dikelola oleh masyarakat terletak di Calang, Kabupaten Aceh Jaya. Bibit Mangrove yang dibudidayakan dan ditanam oleh kelompok ekowisata mangrove sendiri sebagai bentuk upaya pelestarian ekosistem mangrove. Mangrove hasil penanaman tahun 2008 Pasca Tsunami yang kini tumbuh lebat dan tinggi. Kini dimanfaatkan masyarakat sebagai ekowisata dan edukasi mangrove

STRUKTUR SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUP BIRO PERENCANAAN

Diagram sumber daya manusia Biro Perencanaan di samping merupakan interpretasi dari komposisi jumlah pegawai dalam kelompok interval usia pegawai lima tahunan.

Struktur sumber daya manusia di lingkup Biro Perencanaan baik PNS maupun PPNP, dapat diketahui bahwa mayoritas memiliki rentang usia 21-30 tahun sebanyak 29 orang (30%). Menyusul berikutnya, rentang usia 31-40 tahun sebanyak 16 orang (27%), usia >50 tahun sebanyak 11 orang (27%) dan rentang usia 41-50 tahun sebanyak 10 orang (16%). Data ini menunjukkan, Biro Perencanaan yang didominasi pada usia rentang 21-30 tahun, cenderung produktif serta kreatif dalam bekerja.



PERENCANAAN KINERJA



Foto oleh Sarwono Putri

02

RENCANA STRATEGIS

2020 -2024

2024

Terwujudnya pelayanan perencanaan yang berkualitas,
akuntabel dan profesional dalam mendukung reformasi
birokrasi KLHK

IKK 1. Nilai SAKIP 80 Poin

IKK 2. Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan 4 Poin

2023

Terwujudnya budaya kerja melayani dalam
Aparatur Sipil Negara Biro Perencanaan
dengan penilaian kepuasan para
stakeholder yang memuaskan.

IKK 1. Nilai SAKIP 78 Poin

**IKK 2. Tingkat Kepuasan Layanan
Perencanaan 4 Poin**

2021

Perbaikan tata kelola perencanaan
kinerja, pelayanan dan sistem data
informasi.

IKK 1. Nilai SAKIP 74 Poin

**IKK 2. Tingkat Kepuasan Layanan
Perencanaan 4 Poin**

2022

Terciptanya akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah dengan nilai SAKIP yang selalu
meningkat dengan dibarengi perbaikan
kinerja di tapak.

IKK 1. Nilai SAKIP 76 Poin

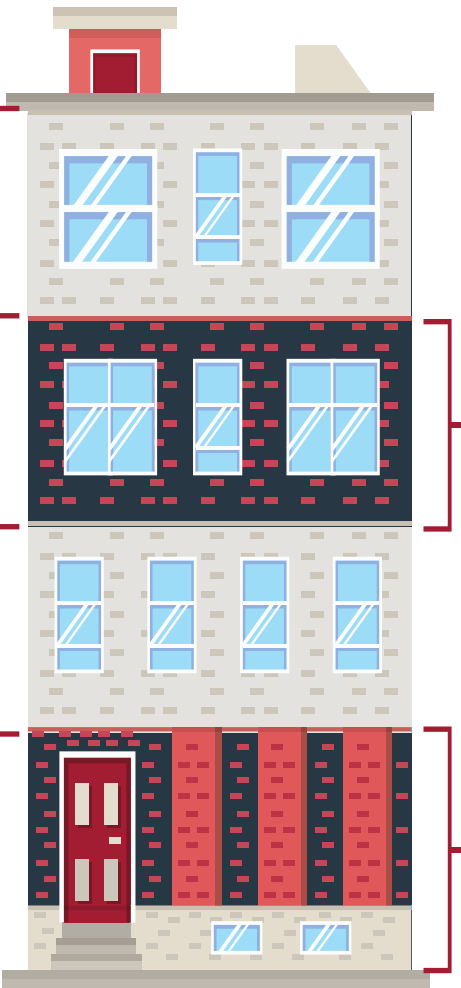
**IKK 2. Tingkat Kepuasan Layanan
Perencanaan 4 Poin**

2020

Penataan kelembagaan dan penguatan
manajemen SDM Perencana menuju SDM
yang professional dan kompeten

IKK 1. Nilai SAKIP 72 Poin

**IKK 2. Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan
4 Poin**



RENCANA KERJA

2021

Tahun 2021, arah kinerja yang ingin dicapai oleh Biro Perencanaan dari keberhasilan program Dukungan Manajemen yang diampu adalah menuju pemerintahan yang dinamis. Cita-cita lain dalam mendukung keberhasilan kinerja adalah memiliki struktur organisasi yang *agile*, serta dapat mengidentifikasi masalah dan peluang, dan mampu beradaptasi mengikuti isu sesuai dengan perkembangan kebijakan strategis pembangunan.

Sesuai dengan kegiatan yang diampu oleh Biro Perencanaan yaitu koordinasi perencanaan dan evaluasi adalah penguatan sistem akuntabilitas kinerja lingkup KLHK. SAKIP merupakan salah satu unsur komponen yang dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi.

Dari penilaian SAKIP, kinerja KLHK dapat terus didongkrak terus menjadi lebih baik dan berkualitas.

IKK selanjutnya pada kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi mengenai kepuasan pelayanan perencanaan, mempertahankan nilai merupakan hal yang cukup sulit dilakukan ketimbang mengejar nilai. Ditinjau dari sisi pelayanan publik, diharapkan Biro Perencanaan dapat memberikan pelayanan perencanaan yang akuntabel dan responsive. Tercapainya nilai pelayanan yang baik dapat dilakukan dengan tersusunnya standar pelayanan, memiliki pintu- pintu pelayanan yang terintegrasi baik secara manual atau elektronik, serta ruang konsultasi yang terbuka bagi aspirasi membangun, serta dapat lebih responsif dalam memberikan solusi.

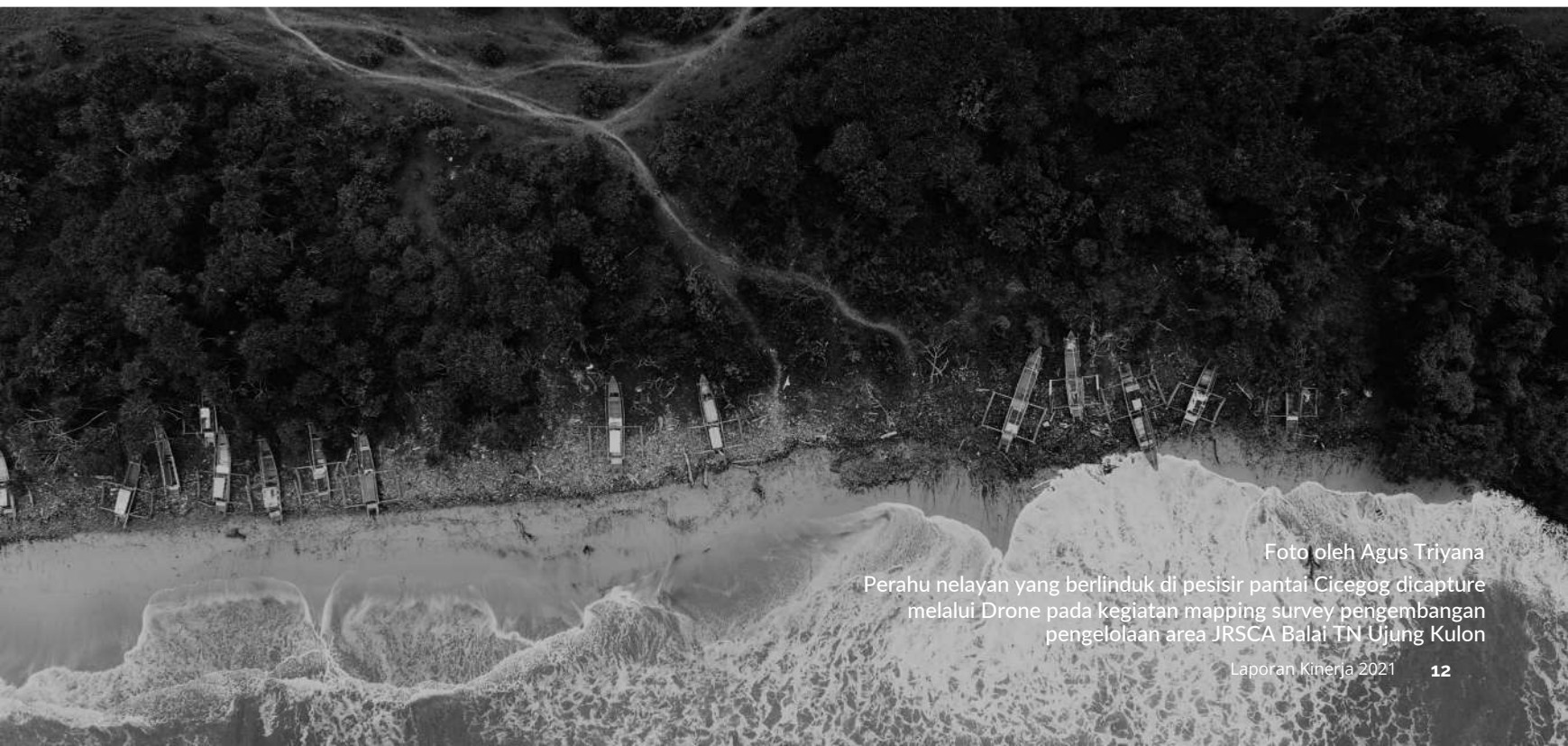


Foto oleh Agus Triyana
Perahu nelayan yang berlinduk di pesisir pantai Cicegog dicapture melalui Drone pada kegiatan mapping survey pengembangan pengelolaan area JRSCA Balai TN Ujung Kulon

PERJANJIAN KINERJA 2021

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Sekretaris Jenderal KLHK dengan Kepala Biro Perencanaan telah menargetkan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan.

4 Poin

Tingkat Kepuasan
Layanan
Perencanaan

1



Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK)

74 Poin

NILAI SAKIP
KLHK



2

Foto oleh Yunita Aprilia
Menanti nyanyian Owa Siamang (*Symphalangus syndactylus*) di
Stasiun Konservasi Bukit Lawang, TN Gunung Leuser

AKUNTABILITAS KINERJA



Foto oleh Yayan Istyan

03

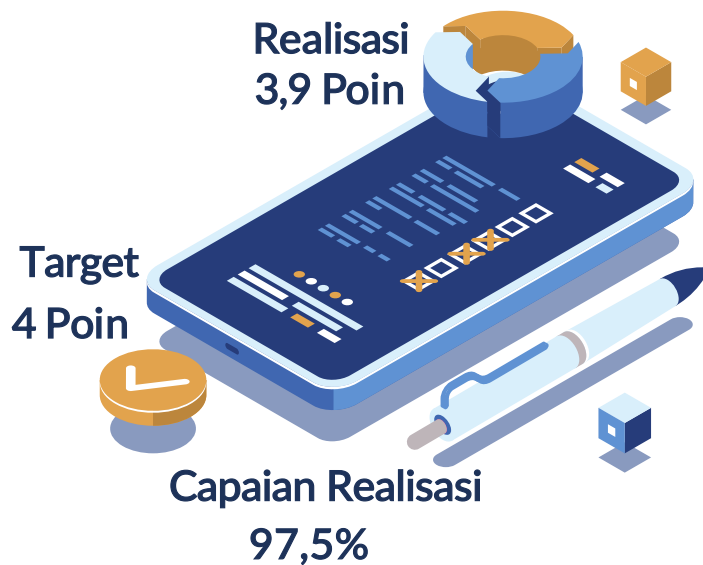


IKK 1.

TINGKAT KEPUASAN LAYANAN PERENCANAAN



TINGKAT LAYANAN KEPUASAN PERENCANAAN TAHUN 2021



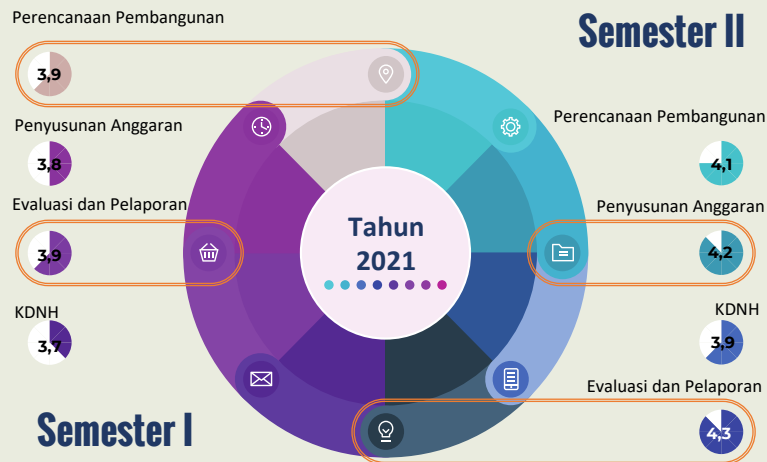
4 POIN	3,8 POIN	4 POIN	3,8 POIN
Perencanaan Pembangunan	Penyusunan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan	Kerjasama Dalam Negeri dan Hibah

Dalam memenuhi sasaran pada Indeks Kinerja Kegiatan 1 (IKK 1) Tingkat Layanan Kepuasan Perencanaan. Biro Perencanaan melaksanakan survey layanan kepuasan dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 2 kali yaitu pada semester I dan semester II, dengan responden satuan kerja pada masing-masing unit kerja eselon I. Kuesioner ini menggunakan skala likert, responden diminta untuk mengukur tingkat layanan kepuasan dengan angka 1-5 (Sangat Tidak Puas- Sangat Puas).

Pengolahan indeks kepuasan layanan Biro Perencanaan diolah menggunakan aplikasi SPSS untuk analisis *missing value* dan excel untuk memperoleh hasil akhir. Keseluruhan data standar deviasi responden menghasilkan angka yang tidak lebih besar dari nilai rata-rata. Hal tersebut menunjukkan bahwa data kuesioner seluruhnya valid (dapat digunakan). Nilai indeks kepuasan layanan Biro Perencanaan diperoleh sebesar 3,9 poin pada tahun 2021 dengan target 4 poin. Capaian kinerja indeks kepuasan sebesar 97,5% dalam satu tahun.

Ekspresi pada tahun 2021 jika diurutkan dari nilai kepuasan paling besar adalah Bagian Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi dan pelaporan masing-masing sebesar 4 poin atau 100%, sedangkan pada urutan selanjutnya terdapat bagian Penyusunan Anggaran dan Kerjasama Dalam Negeri dan Hibah sebesar 3,8 poin atau 95%.

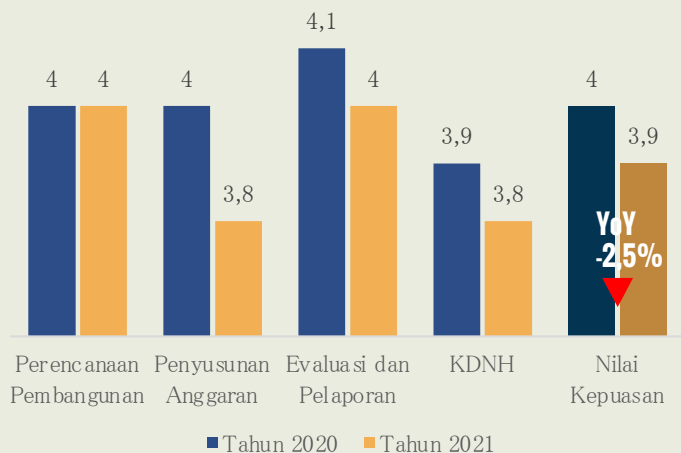
KOMPONEN LAYANAN KEPUASAN



*Penilaian menggunakan skala likert, dimana angka 1 menunjukkan sangat tidak puas/sangat tidak penting, dan 5 menunjukkan sangat puas/sangat penting.

Layanan kepuasan Biro Perencanaan merupakan IKK yang baru dimulai pada tahun 2020. Grafik disamping merupakan penyajian perbandingan tingkat layanan kepuasan dari semester I dan semester II. Hasil capaian kuesioner layanan kepuasan pada semester II secara keseluruhan (4 komponen penilaian) mengalami peningkatan sebesar 0,3 poin. Jika diinterpretasikan lebih lanjut, layanan kepuasan Biro Perencanaan menurut responden memiliki peningkatan dengan nilai yang sama. Namun, jika dilihat lebih lanjut nilai pada semester II paling tinggi diraih oleh layanan kepuasan Evaluasi dan pelaporan sebesar 4,3 poin.

Tingkat Layanan Kepuasan TA 2020-2021



Grafik disamping menunjukkan informasi nilai layanan kepuasan dari tahun 2020 menuju tahun 2021. Terlihat bahwa memiliki YoY sebesar -2,5% yaitu terjadi penurunan sebesar 0,1 poin pada tahun 2021. Jika dilihat dari 4 komponen penyusun indeks tersebut dapat dilihat bahwa tidak terjadi penurunan poin hanya pada komponen perencanaan pembangunan. Lalu terjadi penurunan poin paling signifikan diantaranya adalah pada penyusunan anggaran sebesar 0,2 poin.

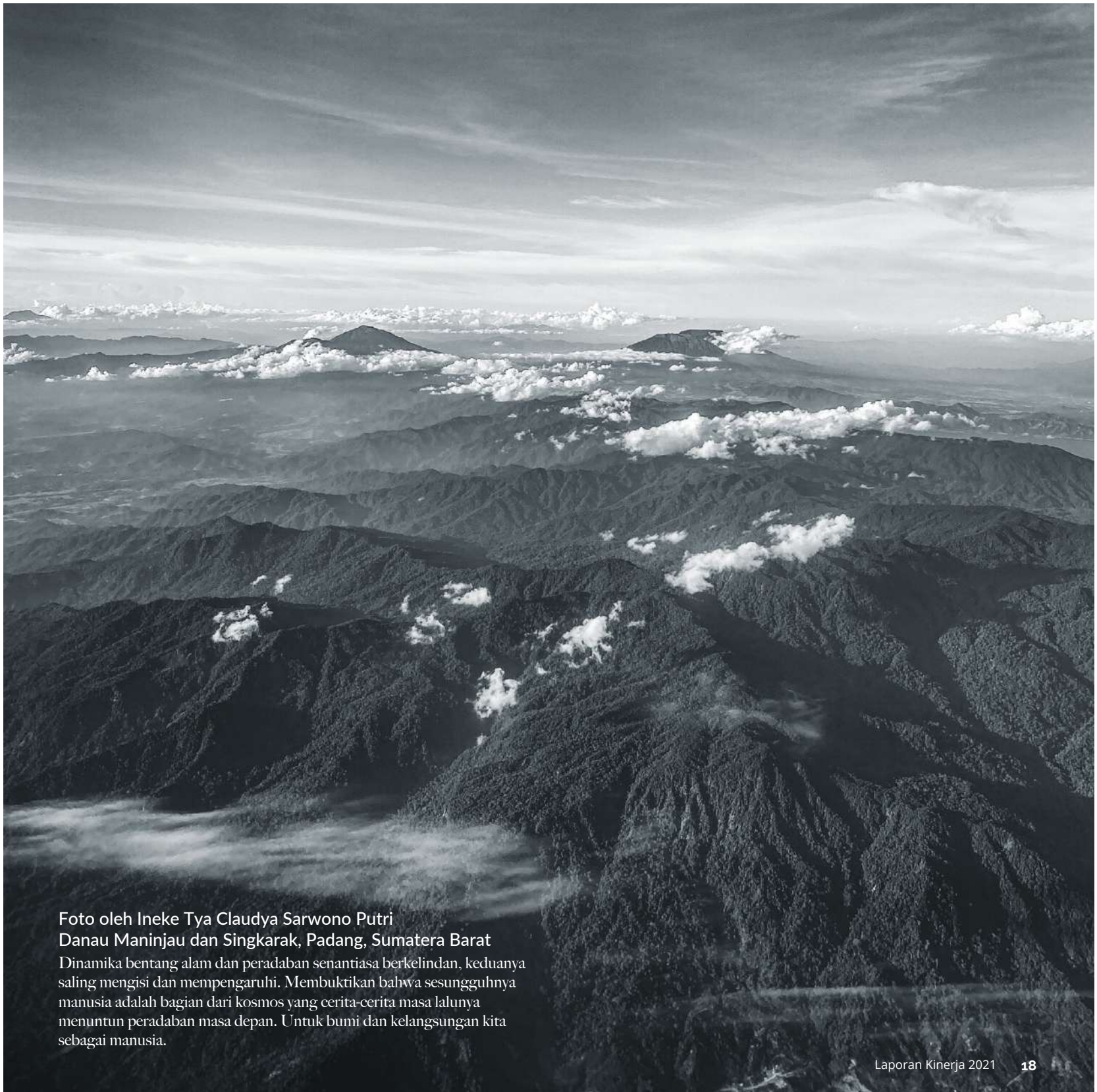
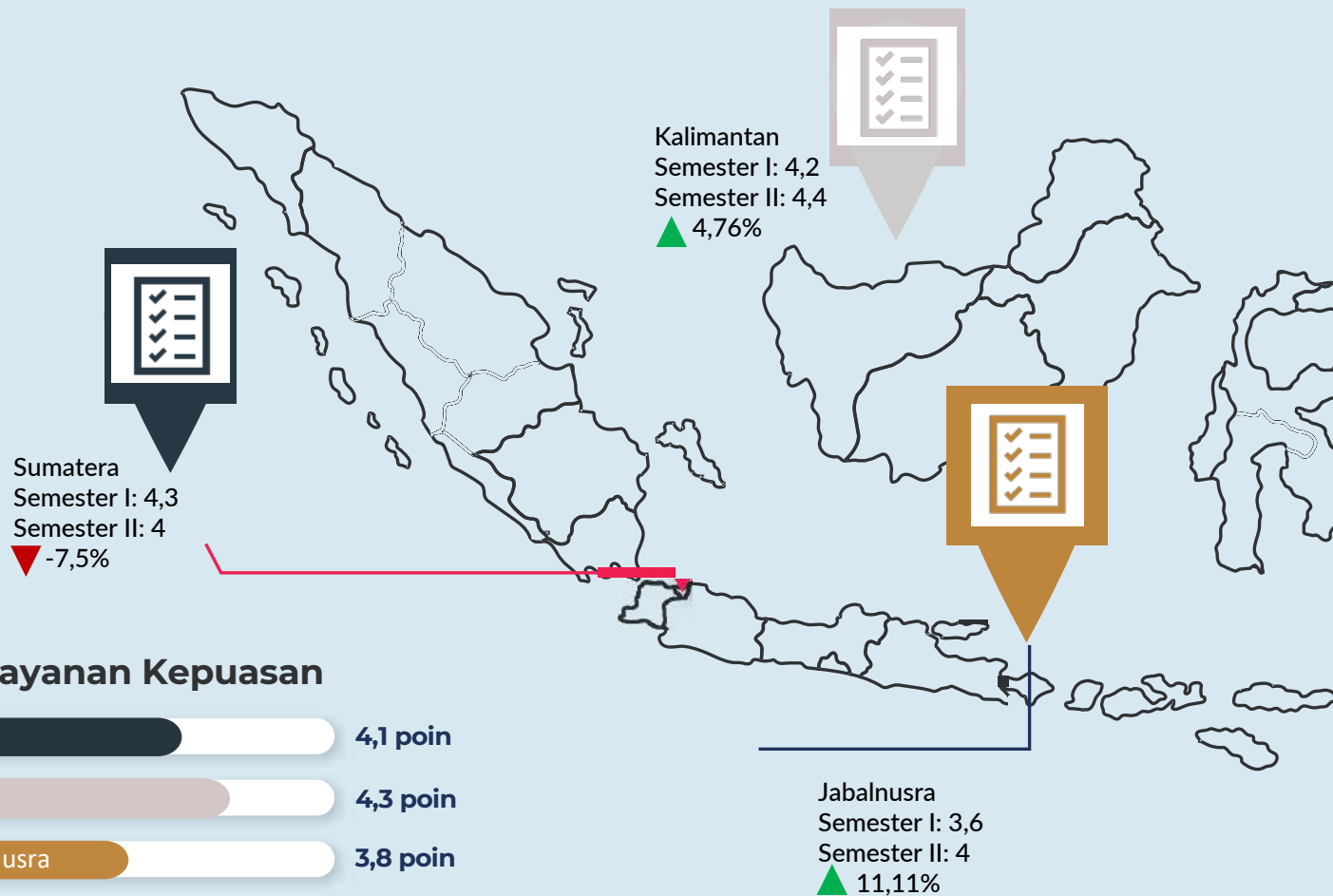


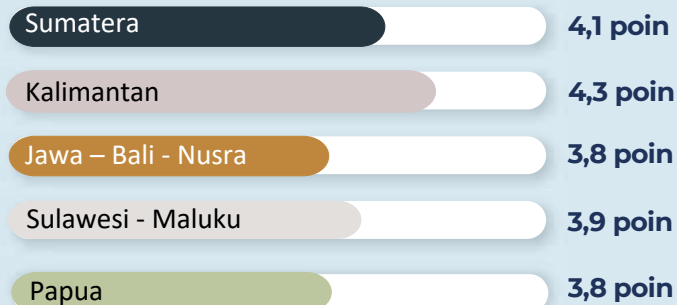
Foto oleh Ineke Tya Claudya Sarwono Putri
Danau Maninjau dan Singkarak, Padang, Sumatera Barat

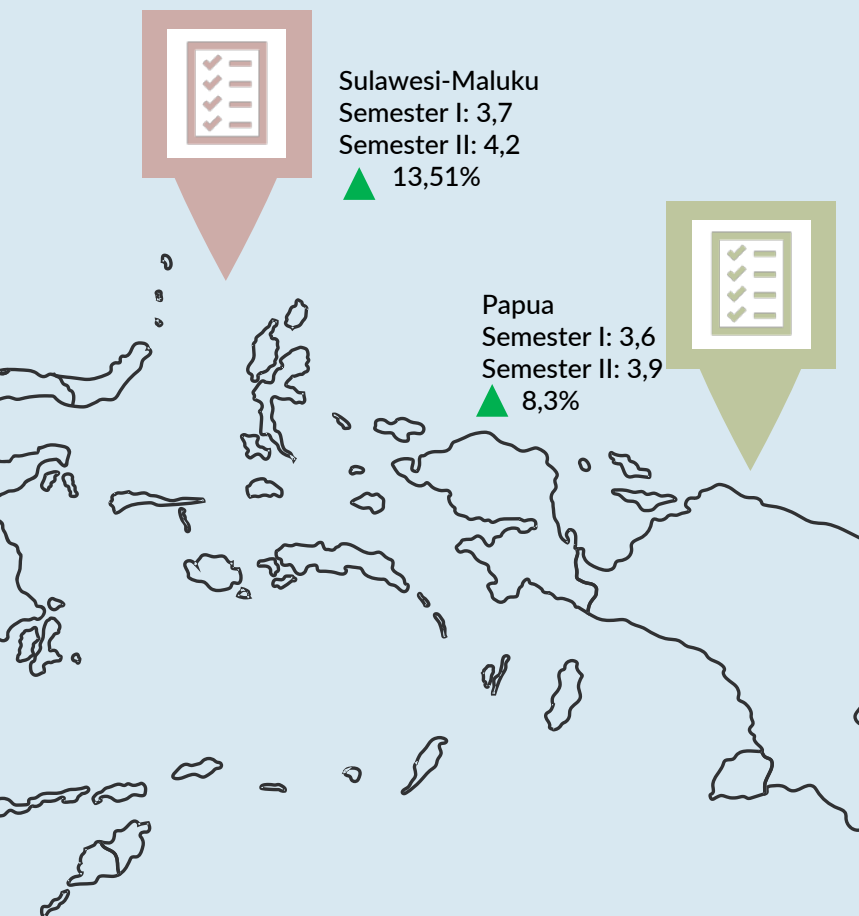
Dinamika bentang alam dan peradaban senantiasa berkelindan, keduanya saling mengisi dan mempengaruhi. Membuktikan bahwa sesungguhnya manusia adalah bagian dari kosmos yang cerita-cerita masa lalunya menuntun peradaban masa depan. Untuk bumi dan kelangsungan kita sebagai manusia.

PERSEBARAN TINGKAT KEPUASAN RESPONDEN BERDASARKAN EKOREGION



Tingkat Layanan Kepuasan

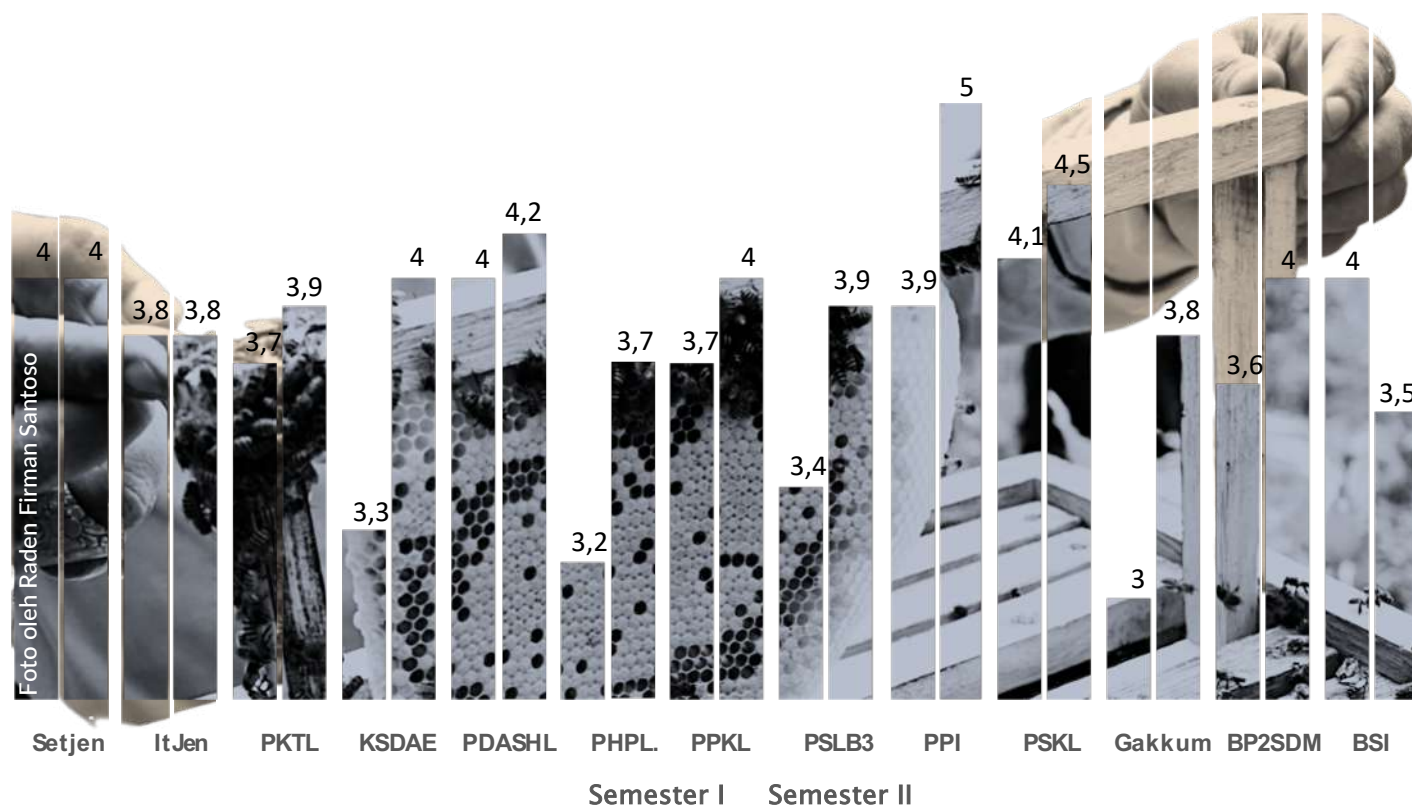




Hasil yang ditunjukkan menurut persebaran data responden berdasarkan wilayah ekoregion terlihat pada Ekoregion Sumatera terjadi penurunan sebesar -7,5% dibandingkan pada pulau lainnya peningkatan layanan kepuasan. Laju peningkatan tertinggi terletak pada Ekoregion Sulawesi-Maluku sebesar 11,9%. Jika diinterpretasi lebih lanjut, laju penurunan layanan kepuasan di Ekoregion Sumatera disebabkan karena belum optimalnya intervensi saran dan masukan yang ada pada semester I untuk diterapkan di semester II. Diantaranya adalah jadwal, undangan, dan permintaan yang mendadak serta harus meningkatkan pemanfaatan terhadap sistem digital.

Dalam satu tahun dari semester I sampai pada semester II TA 2021, Wilayah ekoregion yang memiliki nilai kepuasan tertinggi adalah Ekoregion Kalimantan yaitu sebesar 4,3 poin setelah itu adalah Ekoregion Sumatera sebesar 4,1 poin. Sedangkan perolehan terkecil adalah Ekoregion Papua dan Jabalnusra sebesar 3,8 poin.

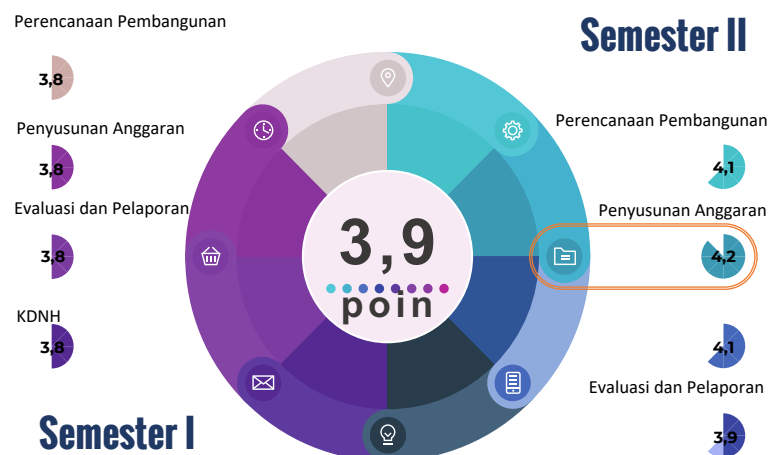
TINGKAT LAYANAN KEPUASAN BERDASARKAN ESELON I TA 2021



Grafik diatas menunjukkan tingkat kepuasan berdasarkan klasifikasi pada unit kerja eselon I. Pengukuran ini untuk mengetahui tingkat kepuasan pada masing-masing eselon I terhadap pelayanan Biro Perencanaan pada tahun 2021 pada semester I dan semester II.

KSDAE, PPI, dan Gakkum merupakan eselon I yang memiliki laju peningkatan tingkat layanan kepuasan paling besar dari semester I ke semester II, dengan nilai peningkatyan masing-masing sebesar 0,7 poin, 1,1 poin, dan 0,8 poin. Sedangkan penurunan tingkat layanan kepuasan menurut eselon I hanya terjadi pada BSI sebesar 0,5. Namun terdapat hasil kuesioner yang stabil (laju peningkatan sebesar 0) selama semester I sampai pada semester II yaitu untuk unit kerja eselon I Setjen dan Itjen.

TINGKAT LAYANAN KEPENTINGAN PERENCANAAN TAHUN 2021

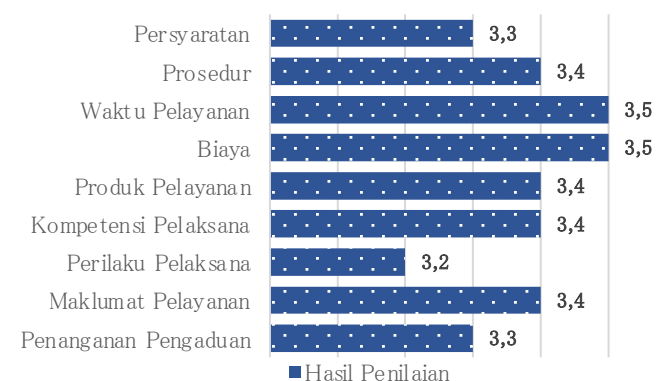


*Penilaian menggunakan skala likert, dimana angka 1 menunjukkan sangat tidak puas/sangat tidak penting, dan 5 menunjukkan sangat puas/sangat penting.

Angka 3,9 poin merupakan ekspresi tingkat layanan kepentingan terhadap Biro Perencanaan. Tingkat layanan kepentingan ini memiliki 4 komponen yang sama dengan tingkat layanan kepuasan dan indeks menurut pedoman kuesioner MenPan-RB 14/17 yang terbagi menjadi 9 indikator.

Menurut data hasil responden pada tahun 2021 diperoleh indeks nilai kepentingan 3,9 poin menurut skala likert yang berarti seluruh komponen dalam Biro Perencanaan adalah penting. Hasil tersebut diperoleh melalui rerata dari indeks perencanaan sebesar 3,9 poin, penyusunan anggaran sebesar 3,9 poin, indeks kerjasama dalam negeri dan hibah sebesar 3,85 poin serta evaluasi dan pelaporan sebesar 4 poin. Jika dilihat lebih lanjut tingkat kepentingan paling tinggi adalah komponen evaluasi dan pelaporan.

Pedoman Kuesioner menurut MenPan-RB 14/2017



*Penilaian menggunakan skala Likert, dimana angka 1 menunjukkan sangat tidak puas/ tidak baik/ tidak mampu/sangat lambat, dan 5 menunjukkan sangat puas/sangat penting/sangat cepat.

Penilaian responden terkait pedoman kuesioner menurut Menpan-RB 14-2017 memiliki modus paling banyak pada angka 3,4 poin terdiri dari prosedur, produk pelayanan, kompetensi pelaksana, dan maklumat pelayanan yang menunjukkan angka baik. Namun, terdapat indeks yang memiliki penilaian paling rendah yaitu terletak pada komponen perilaku pelaksana sebesar 3,2 poin. Jika diartikan dalam skala likert adalah cukup. Hal ini memerlukan intervensi lebih lanjut dalam komponen tersebut.



SARAN DAN MASUKAN

- Memerlukan fasilitasi untuk ruang konsultasi yang terbuka
- Meningkatkan pelayanan dan koordinasi kepada unit kerja KLHK
- Memperbanyak bimbingan teknis kepada satker dan rapat secara rutin baik online maupun offline
- Selalu memperbaharui informasi lebih cepat dan efisien
- Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dan mutu pelayanan yang lebih solutif
- Memprioritaskan usulan anggaran dari satuan kerja
- Lebih efisiensi dalam hal administrasi

HARAPAN KEDEPAN

- Biro Perencanaan yang lebih baik, responsive, dan transparan
- Koordinasi strategi untuk perencanaan tahun 2022
- Mengadakan sosialisasi berkala kepada operator aplikasi pelaporan
- Menjadi lebih terkoordinir dan pelayanan perencanaan semakin meningkat
- Intensif untuk monitoring dan evaluasi
- Merevisi renstra KLHK sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini
- Memberikan apresiasi kepada Unit Kerja Eselon 1 yang memiliki kinerja yang baik (*reward*)
- Menjadi lebih profesional, bermartabat, dan dapat dipercaya

BIRO PERENCANAAN



IKK 2.

NILAI SAKIP KLHK



PERKEMBANGAN NILAI SAKIP KEMENTERIAN LHK



Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Sesuai dengan tujuan tersebut, maka nilai SAKIP merepresentasikan kualitas pertanggungjawaban anggaran dalam bentuk capaian-capaian program yang telah direncanakan. Dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Biro Perencanaan dan Sekretaris Jenderal, telah diperjanjikan bahwa nilai SAKIP Kementerian LHK Tahun 2021 74 poin.

Berdasarkan Surat Kementerian PAN dan RB Nomor B/54/M.AA.05/2021 capaian nilai SAKIP Tahun 2021 adalah 71,72 atau predikat BB (menggunakan pendekatan nilai SAKIP tahun 2020, menunggu hasil penilaian SAKIP 2021 dari Kementerian PAN RB)





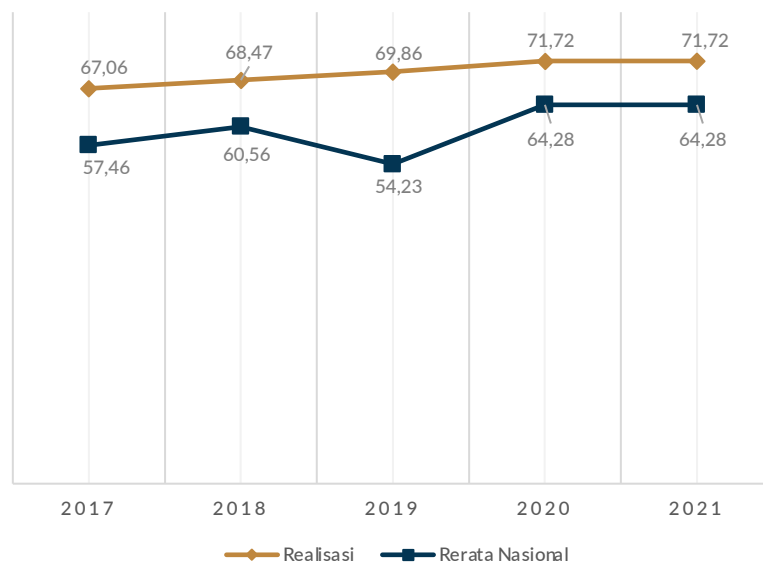
Foto oleh Aisha kemala Wijayanti

Menyebrangi Jembatan Gantung terpanjang se-Asia Tenggara di lokasi wisata Situ Gunung, wilayah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Nilai tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang baik jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaran pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian LHK sudah berjalan dengan sangat baik.

Perbandingan nilai SAKIP tahun 2021 terhadap target 74 poin menggambarkan capaian kinerja 96,91%. Pencapaian nilai SAKIP tahun ini meningkat 1,86 poin (YoY) dibanding tahun 2019 sebesar 69,86 poin. Perkembangan nilai SAKIP Kementerian LHK meningkat setiap tahun. Hal tersebut digambarkan pada grafik perkembangan nilai SAKIP yang menunjukkan tren yang positif.

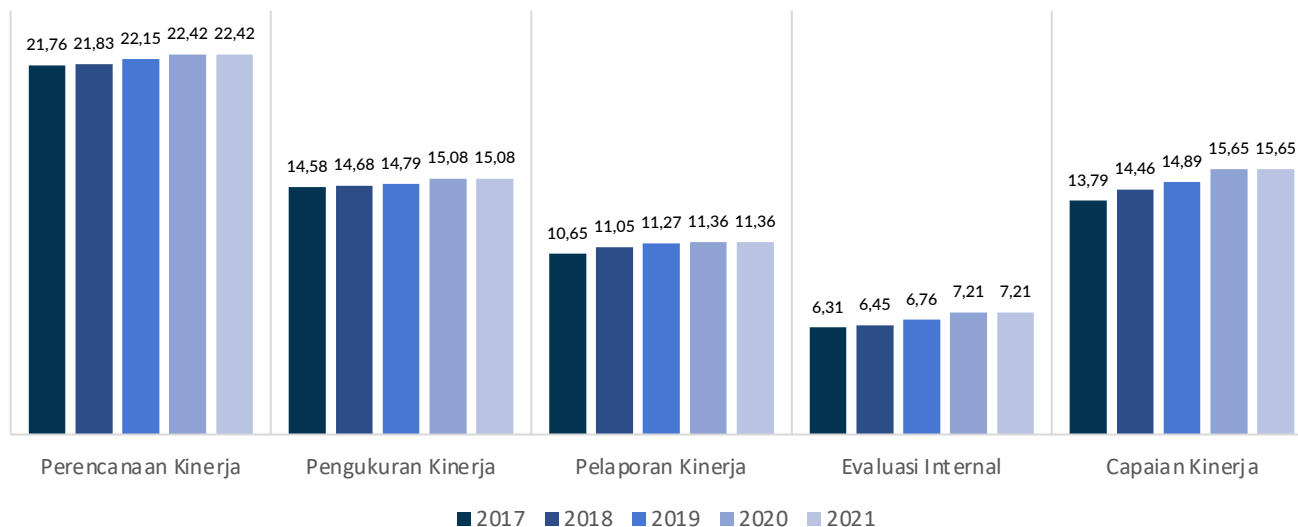
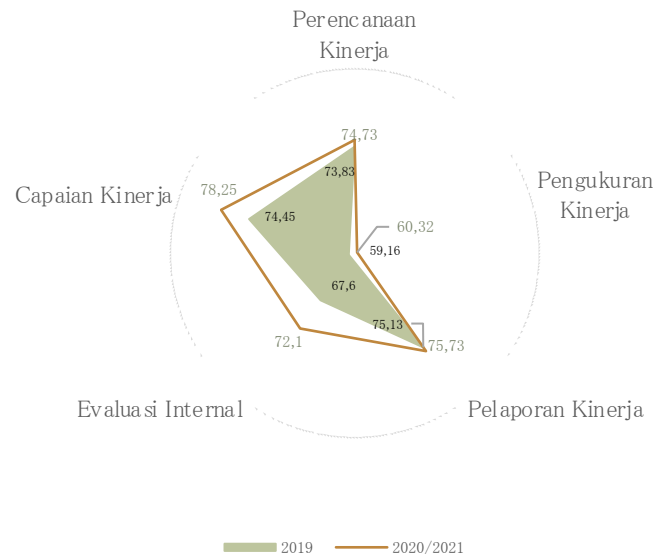
Jika dibandingkan dengan nilai akuntabilitas kinerja rata-rata secara nasional, nilai akuntabilitas Kementerian LHK berada di atas angka rerata akuntabilitas kinerja Nasional. Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian LHK lebih tinggi 7,44 poin dari nilai rerata nasional.



KOMPONEN NILAI SAKIP KEMENTERIAN LHK

Terdapat 5 (lima) komponen dengan masing-masing bobot yang menentukan tinggi rendahnya nilai SAKIP, yaitu: Perencanaan Kinerja (30), Pengukuran Kinerja (25), Pelaporan Kinerja (15), Evaluasi Internal (10), Capaian Kinerja (20).

Dari pencapaian nilai SAKIP tahun 2020, komponen yang menyumbang nilai tertinggi adalah Capaian kinerja yaitu 15,65 dari bobot 20 poin (78,25%) meningkat 3,80 poin YoY dibanding tahun 2019. Selanjutnya pelaporan kinerja yaitu 11,36 dari bobot 15 poin (75,73%), kemudian perencanaan kinerja sebesar 22,42 dari bobot 30 poin (74,73%), dan evaluasi internal yaitu 7,21 dari bobot 10 poin (72,10%). Sedangkan komponen yang menyumbang nilai terendah adalah pengukuran kinerja yaitu 15,08 dari bobot 25 poin (60,32%) meningkat 1,16 poin YoY dibanding tahun 2019.



Perkembangan nilai komponen SAKIP digambarkan pada grafik diatas, seluruh komponen menggambarkan trend positif selama 5 (lima) tahun terakhir

REKOMENDASI PERBAIKAN

Kementerian PANRB melalui surat Nomor : B/54/M.AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 menyampaikan beberapa rekomendasi yang perlu untuk ditindaklanjuti. Berikut ini beberapa rekomendasi yang perlu untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian LHK untuk meningkatkan nilai SAKIP.

Melakukan reviu terhadap penetapan kinerja yang digunakan pada unit kerja sehingga semakin berorientasi hasil

1

5

Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani SAKIP secara berkala sehingga internalisasi budaya kinerja semakin meningkat

Melakukan reviu terhadap pohon kinerja yang dimiliki untuk meningkatkan keselarasan seluruh unit kerja dan memastikan seluruh kinerja terdistribusi dalam organisasi

2

4

Meningkatkan kualitas laporan kinerja unit kerja tingkat eselon II dan memberikan umpan balik terhadap perencanaan kinerja tahun berikutnya

3

Meningkatkan kualitas evaluasi internal dan menindaklanjutinya untuk perbaikan perencanaan atau pelaksanaan kegiatan

TINDAK LANJUT PERBAIKAN

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan kementerian LHK. Salah satu tindak lanjut yang telah dilaksanakan adalah mendorong setiap satuan kerja melaksanakan survei kepuasan pelayanan kepada pihak yang dilayani. Pada tahun 2020 dan 2021, telah dilaksanakan di lingkungan internal Sekretariat Jenderal di masukkan ke dalam indikator kinerja utama.

JANGKA PENDEK 2021

- Mentransformasikan kinerja tahun 2021 memiliki afirmasi terhadap pemulihan ekonomi nasional, transformasi digital dan mendorong pencegahan penularan Covid-19
- Menata arsitektur kinerja berdasarkan SOTK yang baru terintegrasi dengan re-disain perencanaan dan penganggaran
- Membangun aplikasi pemantauan kinerja

JANGKA MENENGAH (2021-2024)

Sasaran utama jangka menengah adalah 80% satuan kerja LHK memiliki kinerja berorientasi hasil menuju birokrasi kelas dunia. Kegiatan ini diawali dengan menyusun Pedoman Implementasi SAKIP lingkup KLHK berorientasi outcome (hasil) yang memuat : kewajiban setiap satuan kerja menyusun dokumen SAKIP, menunjuk pengelola SAKIP, mentoring dan coaching penyusunan dokumen SAKIP, milestone SAKIP LHK, *reward and punishment*.



Foto oleh Dokumentasi Biro Humas
Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

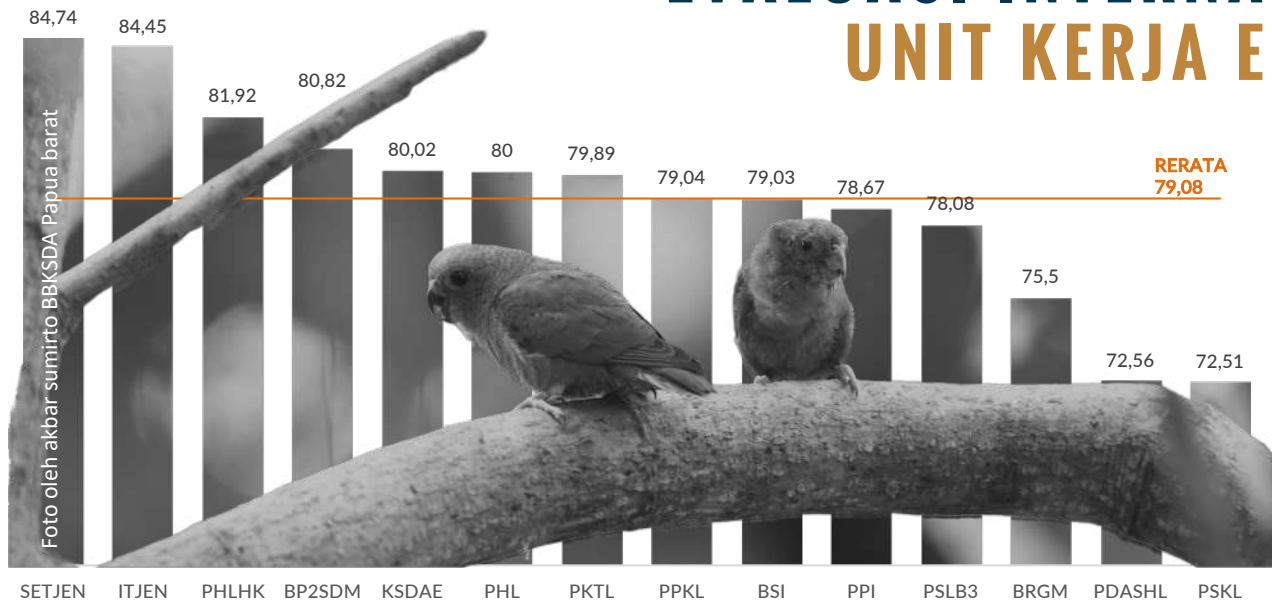
penyerahan DIPA dan penandatanganan PK TA 2022 oleh Menteri Siti Nurbaya kepada Sekretaris Jenderal yang dilaksanakan di Gedung Manggala Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Foto oleh Dokumentasi Biro Humas
Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sambutan oleh Kepala Biro Perencanaan terhadap acara penyerahan DIPA dan penandatanganan PK TA 2022 yang dilaksanakan di Gedung Manggala Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

EVALUASI INTERNAL SAKIP UNIT KERJA ESELON I



Selain hasil penilaian SAKIP Kementerian LHK yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, penilaian juga dilakukan secara internal di lingkup Unit Kerja Eselon I Kementerian LHK yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan hasil evaluasi internal SAKIP tahun 2021 yang pendekatannya menggunakan nilai tahun 2020, nilai SAKIP tertinggi diraih oleh Sekretariat Jenderal, disusul oleh Inspektorat Jenderal dan Ditjen Penegakan Hukum LHK.

Dari hasil penilaian internal SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal diperoleh nilai rerata SAKIP sebesar 79,08 poin. Jika dilihat dari rentang tertinggi hingga terendah, maka kategori SAKIP Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian LHK berkisar dari A sampai dengan BB.



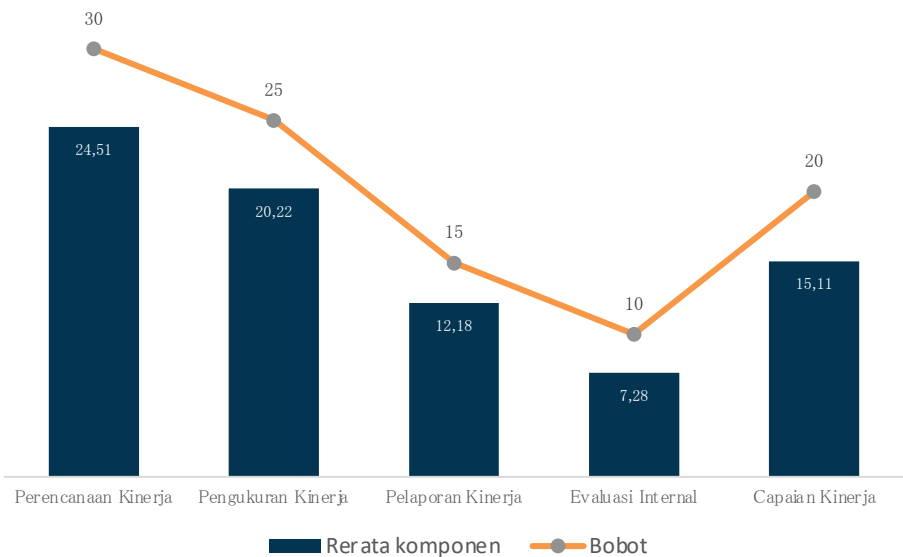
KOMPONEN IMPLEMENTASI SAKIP

UNIT KERJA ESELON I

No.	Komponen	BP2SDM	ITJEN	BSI	SETJEN	PDASRH	PKTL	KSDAB	PHL	PHLHK	PPI	PSKL	PPKL	PSLB3	BRGM	Rerata
1.	Perencanaan Kinerja	26,85	26,57	22,82	27,49	21,76	25,54	25,18	25,53	25,81	25,59	20,07	23,64	22,32	23,95	24,50
2.	Pengukuran Kinerja	20,72	22,50	20,48	20,62	19,05	20,32	19,19	21,93	20,10	20,61	17,87	21,25	19,43	19,06	20,22
3.	Pelaporan Kinerja	12,25	13,43	13,38	13,00	9,92	12,50	13,19	12,18	13,21	10,53	11,92	11,80	11,50	11,74	12,18
4.	Evaluasi Internal	8,40	8,69	6,15	7,83	5,64	7,95	7,12	7,61	7,35	6,53	6,41	7,18	7,83	7,27	7,28
5.	Capaian Kinerja	12,60	13,25	16,20	15,80	16,20	13,58	15,34	15,75	15,45	15,42	16,25	15,17	17,00	13,48	15,10

Berdasarkan hasil evaluasi internal atas implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, dimana rerata nilai SAKIP dari seluruh UKE I lingkup Kementerian LHK sebesar 79,08. Komponen perencanaan kinerja memiliki bobot (proporsi) terbesar dibanding komponen lainnya, sehingga pada komponen inilah perbaikan tata kelola akan memberikan dampak paling signifikan terhadap peningkatan nilai SAKIP KLHK

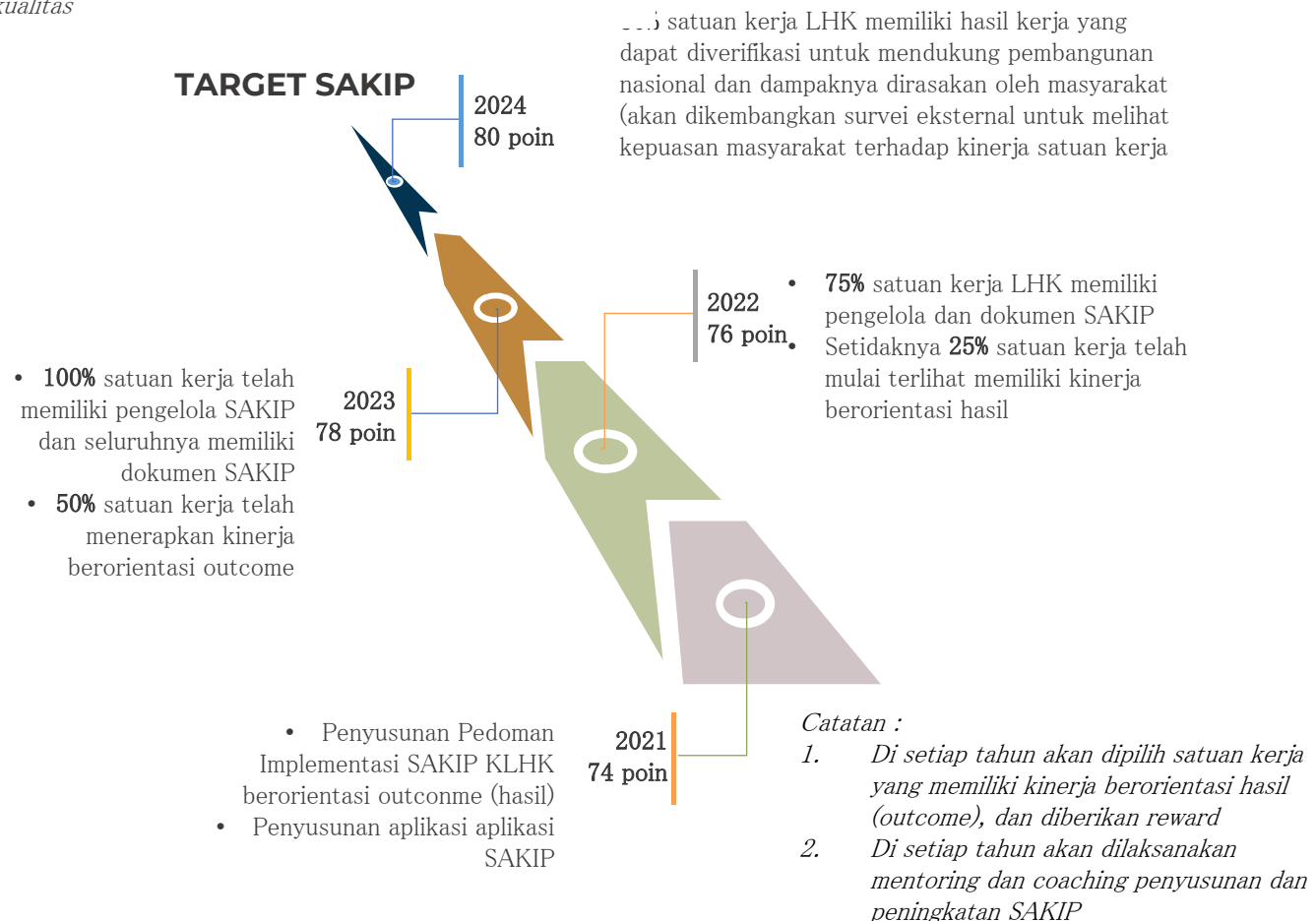
Foto oleh Aisha Kemala Wijayanti
Penghargaan APE TA 2021 yang diberikan oleh K/L yang dinilai telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta memenuhi kebutuhan anak



MILESTONE IMPLEMENTASI DAN PENINGKATAN SAKIP

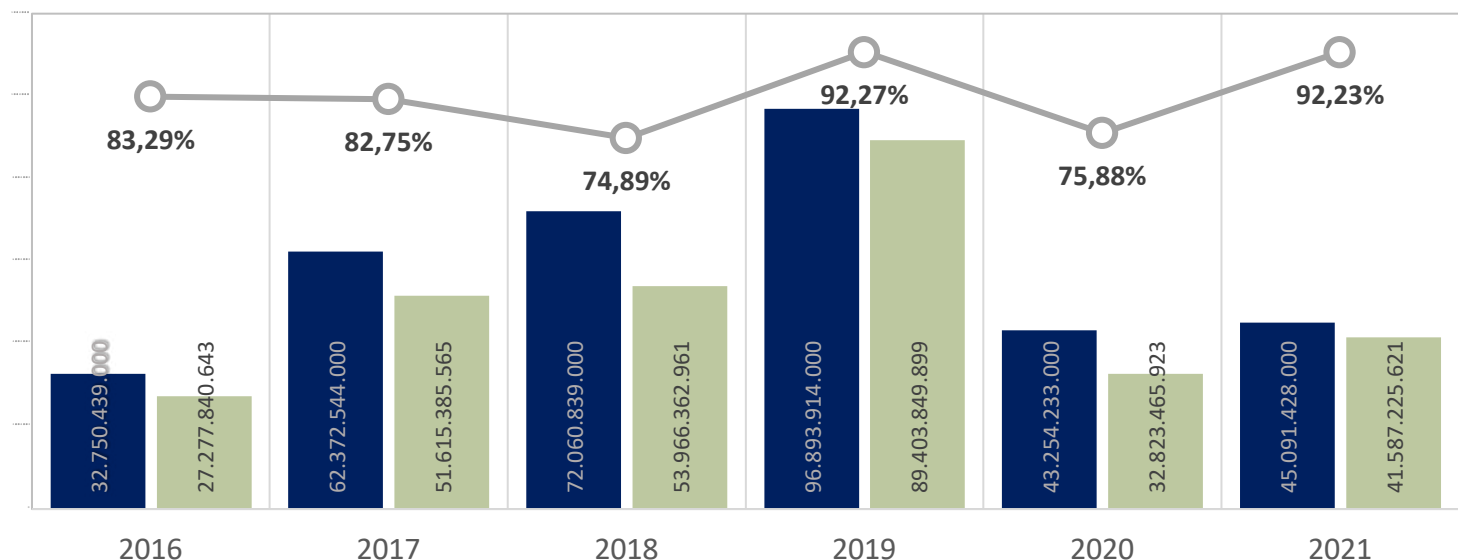
Milestone implementasi dan peningkatan akuntabilitas Kementerian LHK mendorong satker untuk **berkinerja tinggi** sebagai upaya menuju **Pemerintahan Berkelas Dunia** yang dicirikan dengan *Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang efisien dan efektif serta pelayanan publik yang berkualitas*

sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi dalam Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020. Disamping itu milestone penguatan akuntabilitas juga mendorong agar setiap pelaksanaan kegiatan Kementerian LHK mampu menjawab sasaran pembangunan nasional.



TREN PERKEMBANGAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN

Biro Perencanaan



Sumber : OMSPAN, 6 Januari 2022

■ Pagu ■ Realisasi —○— % realisasi

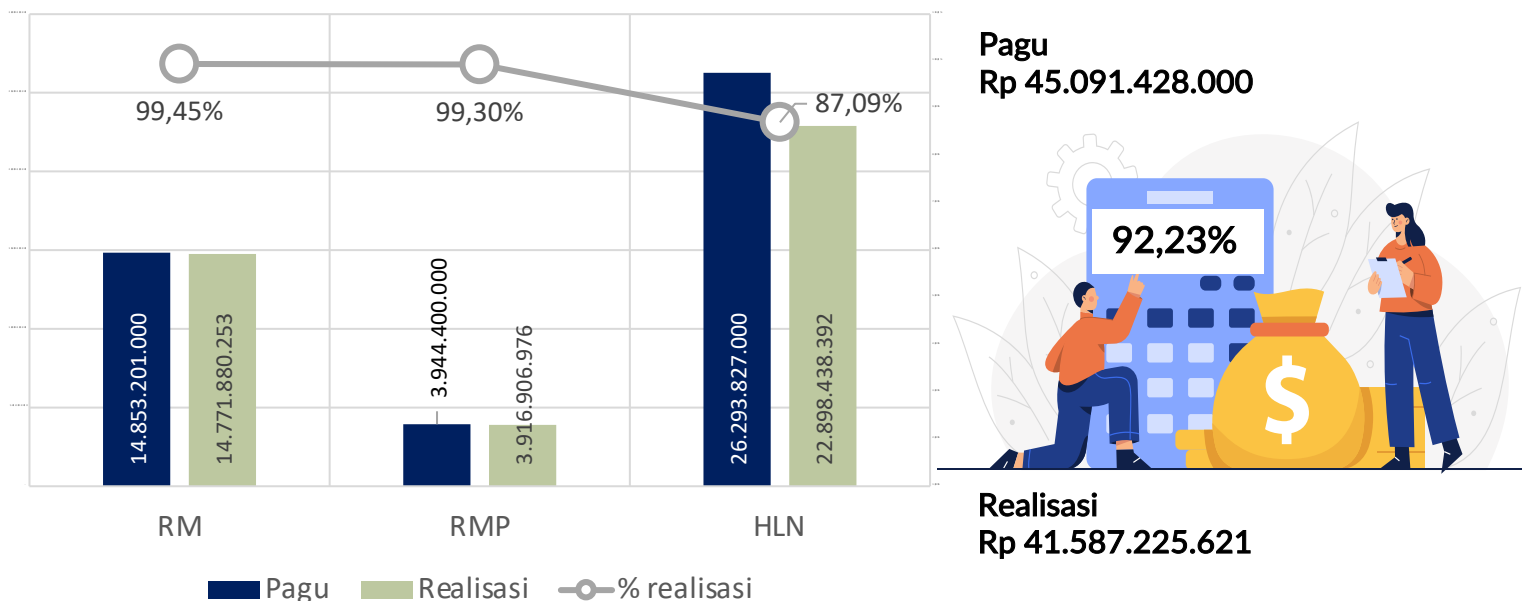
Grafik diatas menunjukkan trend pagu Biro Perencanaan dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Tercatat bahwa pagu Biro Perencanaan paling besar berada di tahun 2019 dengan jumlah Rp. 96.893.914.000,00 dan yang paling sedikit berada di tahun 2016 sebesar Rp.32.750.439.000,00

Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan pagu Biro Perencanaan yang cukup signifikan, dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga dilakukan penghematan dan *refocusing* anggaran.

Jika dilihat dari tahun 2016 sampai 2021, prosentase realisasi terbesar terdapat pada tahun 2019 yaitu 92,27% dan menyusul tahun 2021 sebesar 92,23%.

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TA.2021

Biro Perencanaan



Sumber : OMSPAN, 6 Januari 2022

Grafik diatas menunjukkan jumlah pagu APBN Biro Perencanaan pada tahun 2021 yaitu sejumlah Rp. 45.091.428.000 yang bersumber dari Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping dan Hibah Luar Negeri.

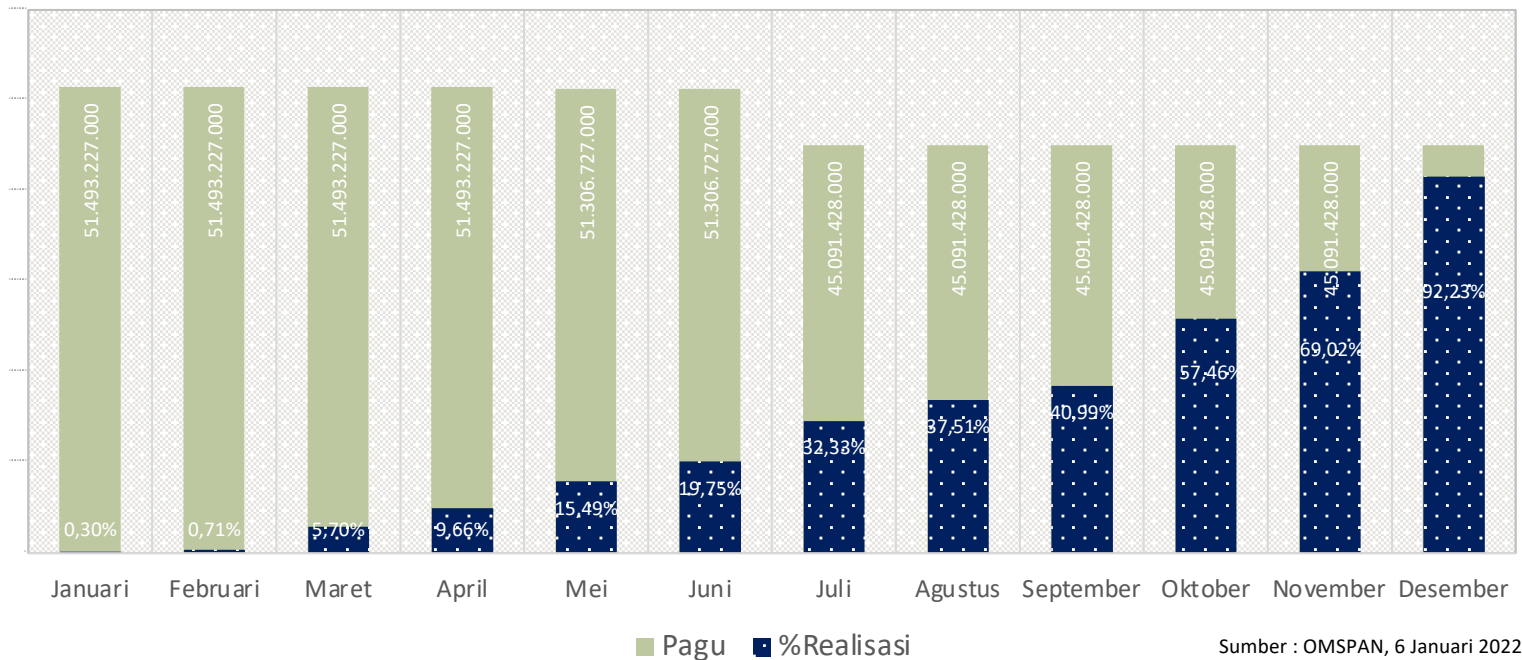
Jika dilihat dari jumlah realisasi anggaran tahun 2021 yaitu sejumlah Rp. 41.587.225.621 (92,23%). Realisasi tersebut lebih tinggi dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya yaitu sebesar 75,88%. Naiknya realisasi di lapangan tersebut dikarenakan mulai normal kembali setelah terkena dampak pandemi covid-19 pada tahun 2020.

Setelah mendapatkan capaian realisasi anggaran tersebut, dilakukan analisis efisiensi penggunaan anggaran dengan cara membandingkan *input* yaitu persentase realisasi anggaran dengan *output* yaitu capaian kinerja.

Hasil capaian kinerja Biro Perencanaan sebesar 97,2% dengan penggunaan anggaran sebesar 92,23% atau rasio sebesar 0,95. Tingkatan efisiensi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran Biro Perencanaan efisien terhadap capaian kinerja karena rasio yang dihasilkan kurang dari 1.

TREN PERKEMBANGAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TA.2021

Biro Perencanaan Per Bulan



Tercatat Pagu Anggaran Biro Perencanaan TA. 2021 bulan Januari sebesar Rp. 51.493.227.000,00. Anggaran tersebut termasuk Hibah Luar Negeri (FORCLIME) sebesar Rp. 30.238.227.000,00 atau 41,28% dari pagu Biro Perencanaan.

Pada tahun 2021 tercatat realisasi Biro Perencanaan adalah sebesar 92,23% atau Rp. 41.587.225.621. Apabila dilihat dari grafik diatas, rata-rata realisasi setiap bulannya (Januari-Desember) adalah sebesar 10,3%.

Terdapat pengurangan pagu yaitu sebanyak Rp.6.215.299.000,00 dalam rangka penghematan dan *refocussing* anggaran mengacu pada Memorandum Sekretaris Jenderal No. M.7/SETJEN/ROCAN/Set.1/7/2021 penghematan tahap III serta memorandum No.M.9/SETJEN/ROCAN/Set.1/7/2021 penghematan tahap IV sehingga pagu Biro Perencanaan menjadi Rp.45.091.428.000,00.



Foto oleh Daffa Ulhaq Adabi
Candi Plaosan, Yogyakarta

Suasana pagi hari berkabut yang indah nan estetik.
Candi ini merupakan Candi Plaosan yang sangat menarik dikunjungi oleh wisatawan. Komplek **Candi Prambanan** merupakan area **candi** Hindu terbesar di Indonesia. **Candi** ini dibangun sekitar pada abad ke-9 oleh Raja Rakai Pikatan dari Kerajaan Mataram Kuno

PENUTUP



04

Kinerja Biro Perencanaan tahun 2021 dengan tingkatan efisiensi dan ketercapaian kinerja yang tinggi merupakan bentuk kontribusi bagi pelaksanaan kegiatan hingga tingkat tapak di Kementerian LHK.

Biro Perencanaan sebagai penyelenggara kegiatan perencanaan dan evaluasi senantiasa terus bergerak dalam meningkatkan kualitas perencanaan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Perbaikan kualitas perencanaan diwujudkan dalam bentuk penyusunan Rencana kinerja yang Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS), dan mekanisme penganggaran yang mendukung visi dan misi Presiden.

Evaluasi kinerja telah membunyikan pada tingkat outcome. Hal ini untuk memastikan bahwa kerja nyata yang telah dilakukan melalui berbagai upaya tidak hanya “sent” namun “delivered”.

Biro Perencanaan juga melaksanakan survey kepuasan internal layanan perencanaan untuk mewujudkan Birokrasi berpelayanan prima. Berdasarkan hasil masukan dan saran dari responden diharapkan kedepannya dapat menjadi strategi untuk mempertajam penerapan sistem akuntabilitas kerja.

Tahun 2021 terdapat 2 (dua) indikator kinerja Biro Perencanaan yaitu Survey Kepuasan Layanan Perencanaan dengan target 4 poin dengan realisasi 3,9 poin (97,5%) dan Nilai SAKIP KLHK dengan target 74 poin dengan realisasi 71,72 poin (96,91%). Ikhtisar kinerja Biro Perencanaan sebesar 97,2% yang dihasilkan dari rerata capaian kedua indikator kegiatan.

Capaian tersebut tidak lepas dari peran serta seluruh stakeholder, utamanya perubahan budaya para ASN dan pegawai lingkup Biro Perencanaan yang semakin berorientasi pada peningkatan kinerja.

Menutup laporan kinerja ini, diharapkan pada waktu mendatang Biro Perencanaan senantiasa menjadi penggerak perbaikan target capaian kinerja dan mendorong kinerja hingga pada tingkatan Outcome.



Atas. Bapak Edi selaku ketua KTH Sutera Bina Mandiri menunjukkan Rumah Kokon dimana sekat-sekat berongga ini mampu menampung 300-400 ekor ulat besar yang sudah siap mengokon mengikuti rangkaian kelas dan ruang diskusi selama 6 bulan.
Foto oleh Lastri Simanjuntak

Bawah. Pulau kelalawar merupakan salah satu pulau yang berada diantara gugusan pulau-pulau di kawasan Raja Ampat. Selain merupakan destinasi wisata untuk para pecinta keindahan bawah laut dalam melakukan kegiatan menyelam ataupun snorkeling, pulau ini kerap digunakan juga sebagai destinasi untuk para pelancong dalam melihat aktivitas kelalawar terutama pada sore hari serta dijadikan sebagai sarana riset bagi peneliti yang berfokus pada kajian terkait jenis-jenis dan aktivitas kelalawar. **Foto oleh Panji Prakoso**

LAMPIRAN





PENGARUSUTAMAAN TPB/SDGS DI KLHK TAHUN 2021

Foto oleh Muhayar

Tujuan besar dari pembangunan di Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada setiap golongan. Tujuan ini sejatinya selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan kesepakatan 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditetapkan pada tahun 2015 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat global termasuk Indonesia. Oleh karenanya SDGs sebagai agenda pembangunan global sungguh sejalan dengan RPJMN dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional.

Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan SDGs karena tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan global saling menguatkan. TPB/SDGs adalah Agenda 2030 yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. TPB/SDGs berprinsip Universal, Integrasi dan Inklusif, untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau disebut *NO ONE LEFT BEHIND*.

Untuk mendukung pencapaian TPB/SDGs di Indonesia, KLHK telah mengarusutamakan TPB/SDGs kedalam Program dan Kegiatan yang telah direncanakan. Merujuk pada prinsip *no-one left behind*, maka berbagai upaya serta langkah yang telah dilakukan maupun akan direncanakan perlu diselaraskan dengan Target dan Indikator TPB/SDGs. Biro Perencanaan sebagai unit organisasi yang berperan untuk melaksanakan penyiapan koordinasi dan integrasi penyusunan bahan rencana, program, anggaran, dan kerja sama, pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, telah mengawal *mainstreaming* TPB/SDGs agar terintegrasi ke dalam Program dan Kegiatan KLHK.

Pada tahun 2021, Biro Perencanaan telah melakukan dan atau mengikuti beberapa pertemuan rutin untuk memenuhi proses penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs yang digawangi oleh Sekretariat Nasional SDGs Nasional di Bappenas.





Sebagai bagian dari koordinasi layanan perencanaan di KLHK, Biro perencanaan telah melakukan upaya untuk mendokumentasikan berbagai kontribusi kegiatan terhadap TPB/SDGs di KLHK, yaitu melalui penyusunan buku SDGs Scorecard; (Panduan untuk reviu kontribusi Rincian Output/ RO terhadap tujuan, target & indikator TPB/SDGs; serta penyelenggaraan lomba karya tulis TPB/SDGs KLHK bagi ASN lingkup KLHK.

Lomba karya tulis SDGs KLHK baru pertama kali dilakukan pada tahun 2021. Lomba ini bertujuan untuk Meningkatkan pemahaman parapihak terhadap upaya pencapaian TPB/SDGs di KLHK dan Meningkatkan partisipasi parapihak terhadap dokumentasi kegiatan lingkup KLHK terhadap upaya pencapaian TPB/SDGs di KLHK. Pada event pertama ini sasaran kegiatan lomba adalah Seluruh pegawai ASN (Struktural/Fungsional/Staf) lingkup KLHK.

Rangkaian Lomba Karya Tulis Populer telah dilaksanakan pada 25 Agustus 2021 sampai dengan 30 September 2021. Diawali dengan webinar sosialisasi dan tatacara lomba, hingga akhir batas pengumpulan, telah terpilih 169 karya tulis yang berhak dinilai oleh dewan juri. Dewan Juri terdiri atas perwakilan Akademisi, Perwakilan Sekretariat SDGs Bappenas, dan Perwakilan Media Publikasi.

Dari seluruh karya tulis diatas, dewan juri melakukan penilaian berdasarkan kategori keilmiah, kategori konten SDGs dan kategori populer, serta kategori pilihan favorit dewan juri, sehingga telah ditetapkan 17 karyatulis terpilih yang berhak untuk disajikan pada webinar nasional SDGs KLHK 2021.

Beberapa karya tulis, diluar 169 karya tulis tersebut diatas, tidak bisa diikutsertakan dalam penilaian dewan juri dikarenakan karya tersebut melewati batas waktu pengiriman dan atau karya tulis tersebut merupakan tulisan dari PIC atau Panitia dari masing-masing unit Eselon I. Namun demikian, merujuk pada prinsip *no-one left behind*, seluruh karya tulis yang masuk ke meja panitia, akan dipublikasikan dalam bentuk buku ISBN dengan tema Antologi Esai : Potret Kontribusi Kegiatan lingkup KLHK terhadap pencapaian SDGs (Kumpulan Karya Tulis SDGs KLHK - 2021).



KOORDINASI DAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS TA. 2021

Foto oleh Dokumentasi DAK Semarang



Salah satu kinerja Biro Perencanaan adalah mengkoordinasikan dan mengelola dana transfer daerah yaitu dana alokasi khusus bidang lingkungan hidup dan kehutanan bersama dengan Bappenas, Kemenkeu dan Pemerintah Daerah

Pada tahun 2021 Biro Perencanaan berhasil mengkoordinasikan sebanyak 97 OPD bidang lingkungan hidup (DLH Prov/Kab/Kota), dan 28 OPD bidang kehutanan (Dishut Provinsi) untuk memperoleh anggaran DAK sebesar 610 Miliar Rupiah yang dialokasikan untuk mencapai outcome : meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang tercermin dari meningkatnya nilai Indeks Kualitas LH (IKLH) dan Menurunnya luas lahan kritis di luar kawasan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan



PELAKSANA DAK

 125 OPD OPD Penerima DAK TA.2021 DLH/Dishut/ DLHK Prov/Kab/Kota	 97 OPD OPD Penerima DAK subbidang lingkungan hidup (DLH Prov/Kab/Kota)	 28 OPD OPD Penerima DAK subbidang kehutanan (Dishut Provinsi)
---	--	---

ANGGARAN

 Rp. 610,05 M Total pagu anggaran DAK TA.2021	 Rp. 332,12 M Pagu anggaran subbidang lingkungan hidup	 Rp. 277,94 M Pagu anggaran subbidang kehutanan
---	--	---

TARGET FISIK

 25.134 Satuan volume	 1.627 Satuan volume bidang LH (unit/paket)	 23.507 Satuan volume subbidang kehutanan (unit/paket)
------------------------------------	---	--

 Kegiatan Subbidang Kehutanan 1. Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif Kelompok Tani Hutan (KTH) Madya dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Gold dan/atau a. Sarpras ekonomi produktif KTH Madya, KUPS Gold dan/atau Silver 2. Rehabilitasi hutan dan lahan a. Rehabilitasi mangrove b. Penanaman hutan rakyat c. Pembuatan DAM Penahan d. Pembuatan Gully plug e. Pembuatan Sumur resapan f. Pembangunan sumber benih unggul (5 ha/unit) 3. Kegiatan penunjang a. Program Ketahanan Pangan	 Kegiatan Subbidang Lingkungan Hidup 1. Pengelolaan sampah serta sarana dan prasaran pendukungnya a. Kontainer sampah (kapasitas 6 m3) Arm roll truck b. Bank Sampah Induk (kapasitas 3 ton/hari) c. Mesin press hidrolik d. Mesin pencacah organik e. Gerobak pilah (kapasitas 0.3 ton) f. Motor sampah roda 3 (kapasitas 0.7 ton) g. Dump truck (kapasitas 6 m3) h. Arm roll (kapasitas 6 m3) i. Rumah kompos (kapasitas 1 ton/hari) j. Pusat Daur Ulang Sampah (kapasitas 10 ton/hari) k. Biodigester (kapasitas 1 ton/hari) 2. Early warning system pengendalian bencana lingkungan a. Alat/sistem pemantauan kualitas air secara kontinyu, otomatis dan online (Onlimo) b. Peralatan laboratorium untuk uji kualitas air dan merkuri)
--	---



PENGARUSUTAMAAN GENDER



Foto oleh Arfan Adhi Kurmiawan

Pijakan utama seluruh kebijakan, program dan kegiatan pengarusutamaan gender di kementerian dan lembaga negara dalam pembangunan nasional adalah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. seluruh entitas pemerintah baik pusat maupun daerah diminta berkomitmen untuk menjalankan pembangunan Indonesia yang inklusif dengan mencanangkan pengarusutamaan gender.

Pengarusutamaan gender adalah strategi global dan sekaligus strategi nasional untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan control terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di seluruh tahapan proses pembangunan.

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender. Upaya tersebut mencakup penerbitan Peraturan Menteri LHK Nomor P.31 Tahun 2017 tentang Pedoman pelaksanaan PUG Bidang LHK, hingga kegiatan dalam berbagai bentuk seperti sosialisasi PUG, advokasi kepada para pengambil kebijakan, pengembangan kelembagaan PUG, sampai pada bimbingan teknis untuk mengintegrasikan gender ke dalam siklus proses pembangunan. Pemahaman mengenai PUG menjadi hal penting di setiap sektor pembangunan termasuk bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender telah menghasilkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia berupa Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Pratama pada tahun 2011, APE Madya pada tahun 2013, APE Utama pada tahun 2015, dan APE Mentor (paling tinggi) pada tahun 2018 dan 2021. APE merupakan penghargaan yang diberikan kepada kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang dinilai telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender.

Sebagai penerima APE Mentor, KLHK bertanggungjawab untuk menjadi penggerak dan tauladan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Selain itu KLHK juga harus menciptakan inovasi yang mampu mendorong pelaksanaan PUG dapat dilaksanakan hingga tingkat tapak.

Beberapa inovasi yang dilaksanakan oleh Pokja PUG KLHK antara lain pelaksanaan lomba video story telling, peluncuran system pembelajaran gender, dan yang baru dilaksanakan tahun lalu adalah Festival Gender KLHK 2021, yang bertujuan untuk transformasi *netral gender* menjadi *nature gender* kepada seluruh jajaran Kementerian LHK.

Deberapa upaya dan inovasi yang dilaksanakan Pokja PUG KLHK diharapkan mampu mendorong percepatan implementasi PUG bidang lingkungan hidup dan kehutanan hingga tingkat tapak. Pemenuhan keadilan dan kesetaraan akan mewujudkan pembangunan Indonesia yang semakin Tangguh.

FESTIVAL GENDER KLHK

TEACH
Training for E-Gender
Advancing Change Agents Multi

GLEADS
Gender Leader Summit

GENERETION
Gender Mainstreaming Competition

Tujuan Utama
Transformasi dari kondisi
"Netral Gender"
menjadi **"Nature Gender"**

Strategi
Membangun percakapan
(big conversation)
di lingkungan KLHK

Dampak yang Diharapkan
Melalui rangkaian kelas
GLEADS dan TEACH
akan melahirkan
40 Leaders
1000 Champions
di Kementerian LHK

Main Contents

Month	Topic
June	Gender, Social Inclusion, and Equity
July	Gender, Leadership, and Global Economics
August	Gender, Natural Assets, and Climate Change
September	Gender, Culture, and Social Development
October	Gender, Disabilities, Youth, and Children Rights



Foto oleh Arfan Adhi Kurniawan

PESTA: Pekan Eco Gender dan Pelestarian Alam

Menteri LHK mewisuda 35 orang GLEADERS, yang telah mengikuti rangkaian kelas dan ruang diskusi selama 6 bulan. GLEADS (Gender Leadership Summit) sendiri merupakan salah satu fitur dalam festival gender yang memberikan ruang percakapan tentang gender untuk para pejabat Eselon 2. Dalam setiap pertemuan, para GLEADERS secara bergiliran menjadi pembicara dan bercerita tentang berbagai inisiatif terkait PUG pada masing-masing unit kerja.



KERJASAMA DALAM NEGERI



Foto oleh Arfan Adhi Kurniawan

Kerja Sama Dalam Negeri (KDN) adalah kesepakatan / kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan mitra yang dituangkan dalam bentuk tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kinerja KLHK.

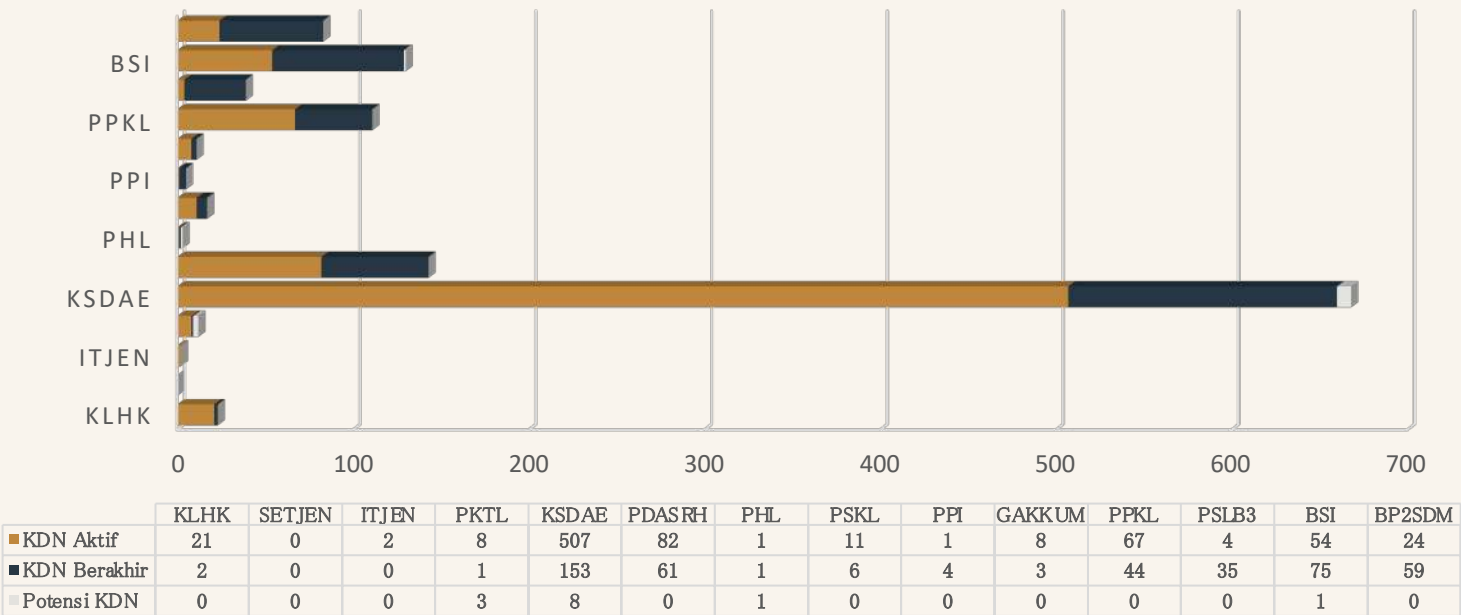
LATAR BELAKANG

Dalam tantangan dan strategi APBN kedepan, Kementerian/Lembaga dituntut untuk meningkatkan kualitas belanja, melakukan efisiensi anggaran, serta mencari sumber pendanaan yang beragam (*creative financing*). Salah satu yang dapat menjadi sumber pendanaan adalah melalui **KERJA SAMA**.

TUJUAN

- Kerja Sama Dalam Negeri di Kementerian LHK bertujuan untuk :
1. Meningkatkan koordinasi dalam negeri antara Kementerian LHK dengan pihak eksternal
 2. Mendukung IKU, IKP, IKK setiap satuan kerja di KLHK
 3. Sebagai *creative financing* dan *filling the gap* untuk program/kegiatan yang tidak didanai APBN

SEBARAN KERJA SAMA DALAM NEGERI



*) Total Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri s/d 31 Desember 2021 yang tercatat dalam Aplikasi Kerja Sama (SIKERJA) sebanyak 1.247 kerja sama & belum semua data tercatat di SIKERJA

APLIKASI KERJASAMA



Gambar. X Logo Aplikasi Kerja Sama (SIKERJA)

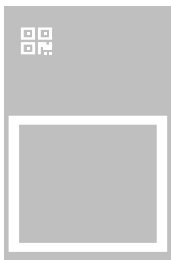
Filosofi Logo SIKERJA :

- Oranye : Hangat, Bersemangat, Optimis, dan Kemampuan dalam Bersosialisasi
- Biru : Tenang, Kecerdasan, dan Percaya Diri
- Berjabat Tangan : Saling Menghargai, Persamaan Kedudukan, Saling Menguntungkan, Itikad Baik, Saling Percaya dalam Pelaksanaan Kerja Sama

Aplikasi Kerja Sama adalah sebuah platform / sistem yang menampilkan informasi tentang Dokumen Kerja Sama yang dilakukan oleh seluruh unit kerja baik Eselon I, Eselon II, maupun UPT yang berada dilingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



SIKERJA bertujuan untuk menertibkan administrasi pengelolaan kerja sama dalam negeri; *update* data kerja sama dalam negeri lingkup KLHK; dan mempermudah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kerja sama (dukungan kerja sama dalam kinerja IKU, IKP, dan IKK)



CAPAIAAN FORCLIME TARGET DAN CAPAIAN 2021

Foto oleh Ajiyan Yogo Pratopo

PROGRAM FORCLIME FC 2021

PENGURANGAN EMISI KARBON

Berdasarkan perhitungan emisi aktual yang dilakukan hingga tahun 2021, dapat dikatakan bahwa kegiatan yang dilakukan telah mencapai target penurunan emisi sebesar 300.000–400.000 tCO₂e, khususnya pada lokasi DA#3 Malinau, DA#7 Berau dan DA#8 Kapuas Hulu. Pada lokasi DA#6 masih menghasilkan emisi yang tinggi karena sebagian besar lokasinya berbatasan langsung dengan masyarakat dan terjadi potensi kebakaran hutan. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh FORCLIME FC untuk mengurangi emisi karbon melalui kegiatan investasi hingga tahun 2021 antara lain:

- Kegiatan investasi yaitu penanaman pohon telah dimulai sejak 2015 di Berau, 2016 di Kapuas Hulu dan Malinau dengan total pohon hidup hingga sekarang 2.242.187 pohon
- Area kawasan hutan yang telah terpatroli di 3 DPMU adalah 691.951,17 ha dengan melibatkan 526 individu sebagai tim patroli
- Terjadi peningkatan tutupan lahan, khususnya pada DA#2, DA#8, DA#7 dan DA#3 memiliki tingkat deforestasi yang lebih rendah hingga tidak ada pada tahun 2020
- Tercapainya PLUP tata batas dan tata guna lahan, melalui penerbitan PerBup Tata Batas 20 Desa Kapuas Hulu, 6 Desa di Malinau, 14 Desa di Berau

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

- *Demonstration plot* yang telah difasilitasi oleh FORCLIME FC telah memberikan pendapatan bagi masyarakat DPMU Kapuas Hulu, Berau, Malinau hingga Semester I 2021 adalah Rp 30.975.501.130,-, antara lain total Kapuas Hulu sebesar Rp 27.372.088.319,-, Berau sebesar Rp 3.457.622.811,-, dan Malinau Rp 145.970.000,-
- Indeks Desa Membangun (IDM) yang dinilai oleh masing-masing perangkat desa dan diupdate setiap tahun oleh pemerintah kabupaten setempat. Dari data tahun 2016 hingga 2021 grafik IDM dilokasi *Demonstration Activity* terus meningkat dengan rata-rata berkembang hingga maju. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa intervensi FORCLIME FC turut mendorong peningkatan IDM

PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Pendampingan Perhutanan Sosial telah dilaksanakan di 19 Hutan Desa dan 1 kemitraan di ketiga Kabupaten, Kapuas Hulu, Berau dan Malinau.

- Setidaknya sebanyak 101 KUPS telah dibentuk oleh Hutan Desa dampingan FORCLIME FC
- Hutan Desa Long Lanuk meraih Juara Harapan III pada penghargaan Wana Lestari
- Pengolahan Produk HHBK yang difasilitasi oleh FORCLIME FC mendapatkan akses pasar untuk penjualan antara lain produk kayu manis dari LPHD Long Berini bekerjasama dengan PT. RMDS Yanto Indonesia dengan penjualan perdana sebanyak 2.726,5 kg dengan pendapatan Rp 143.910.000,-. Produk karet kelompok Tani Jatimur, Labanan Makmur DPMU Berau telah bekerjasama dengan PT. MKC untuk penjualan, hingga 2021 pendapatan yang diterima masyarakat sekitar Rp 81.281.368,-
- Program FORCLIME FC telah memfasilitasi **kegiatan PHL pada dua IUPHHK-HA (PT Sumalindo Lestari Jaya IV dan PT INHUTANI I Unit Labanan)** antara lain Reduced Impact Logging (RIL), pengelolaan dan monitoring area nilai konservasi tinggi (NKT), terjalannya kemitraan kehutanan, dan pelatihan-pelatihan. Pada Januari 2020 PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah memperoleh **sertifikat FSC**.

CAPAIAN MILESTONE FORCLIME

2018

Pelaksanaan Investasi di DA#6 luas 1,262 ha (dengan populasi tanaman mencapai >400,000 pohon, reforestasi, 20 SK Batas Desa, 15 Desa Proses PerBup Batas Desa, 30 Desa PLUP selesai

2020

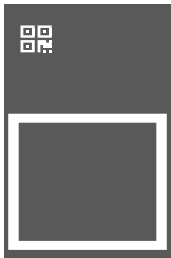
1. Kegiatan investasi *demonstration plot* tetap memberikan kontribusi kepada masyarakat selama pandemi Covid-19
2. Kegiatan inventarisasi karbon dilaksanakan di tiga Kabupaten dampingan FORCLIME FC
3. Proses pengajuan skema Perhutanan Sosial yang terdiri dari 3 Hutan Desa dan 1 Kemitraan dengan 16 desa lainnya telah mendapatkan SK
4. Fasilitasi pemasaran usaha masyarakat yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak perusahaan swasta
5. Pengajuan pemotongan anggaran kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana HLN sebagai dampak pandemi Covid-19
6. Dokumentasi *best practice* kegiatan
7. Penyiapan dokumen *Exit Strategy*

2021

1. Tercapainya target penurunan emisi (300.000–400.000 tCO₂e) pada lokasi DA#3 Malinau, DA#7 Berau dan DA#8 Kapuas Hulu.
2. Kegiatan HHBK kayu manis dan karet telah bekerjasama dengan perusahaan swasta untuk melakukan penjualan
3. 20 Desa telah difasilitasi pendampingan pada skema perhutanan sosial dan Hutan Desa Long Lanuk mendapatkan penghargaan Wana Lestari
4. Dilakukan strategi percepatan untuk mencapai realisasi anggaran 90%
5. Persiapan pengadaan tender konsultansi FORCLIME FC (kegiatan *movev*, *carbon inventory*, *best practices* dan penyusunan profile desa) pada tahun 2022
6. Dilakukan finalisasi penyusunan *Exit Strategy*

2019

1. Penguatan Investasi berdasarkan penilaian setiap DA
2. Validasi metode pengukuran karbon dan verifikasi data penurunan karbon
3. Penyiapan program untuk exit strategy kepada PEMDA, KPH, Hutan Desa dan Kemitraan, BUMDES, Dilanjutkan oleh Donor Lain, dan Persiapan pengelolaan aset
4. Persiapan pengakhiran/perpanjangan Project FORCLIME FC (T - 1)
5. Monitoring Program
6. Dokumentasi best practices dan lesson learned



PERJANJIAN KINERJA

KEPALA BAGIAN



Foto oleh Yayan Istyan

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kepala bagian lingkup biro perencanaan menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Kepala Biro Perencanaan.

Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan dituangkan dalam satu lembar kesepakatan berisi sasaran yang akan dicapai melalui beberapa target indikator. Adapun capaiannya adalah sebagai berikut.

BAGIAN RENCANA DAN PROGRAM

NO	UNIT KERJA	KINERJA YANG DIPERJANJIKAN	CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA
I	Bagian Rencana dan Program	1. Nilai perencanaan kinerja, 23 poin 2. Nilai pengukuran kinerja, 16 poin 3. Jumlah dokumen perencanaan yang holistik, integrative dan berbasis spasial, 14 dokumen 4. Tingkat kepuasan layanan perencanaan Pembangunan LHK, 4 poin	22,42 Poin 15,08 Poin 12 Dokumen 4 Poin	97,48% 94,25% 85,71% 100%
No.	Komponen (intervensi yang dibutuhkan untuk memenuhi kinerja yang diperjanjikan): Koordinasi dan Pembinaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan KLHK			
	1. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan bahan RPJMN dan RKP, serta penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan rencana dan program bidang KSDA, PKTL, PHLHK, dan bidang PPI 2. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan Perjanjian Kinerja Kementerian, serta penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan rencana dan program bidang PDASHL, PSLB3, PPKL, dan PSKL 3. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal, dan penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan program jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dan Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, serta penyiapan bahan pelaksanaan penelitian bidang PHPL, Litbang dan Inovasi, P2SDM, Itjen dan bidang Sekretariat Jenderal. Dari Anggaran Rp. 2,927 Milyar, Bagian Rencana dan Program telah merealisasikan sebesar Rp. 2,926 M atau 99,95%			

BAGIAN PENYUSUNAN ANGGARAN

NO	UNIT KERJA	KINERJA YANG DIPERJANJIKAN	CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA
II	Bagian Penyusunan Anggaran	1. Nilai capaian kinerja, 15 poin 2. Presentasi jumlah anggaran yang diblokir menurun, 9 persen 3. Nilai indikator jumlah revisi anggaran seluruh satker, 77 poin 4. Nilai indikator deviasi rencana penarikan dana, 91 poin 5. Tingkat kepuasan layanan penyusunan anggaran, 4 poin	15,65 Poin 2 Persen 70,62 Poin 96,51 Poin 3,8 Poin	104,33% 22,22% 91,71% 106,05% 95%
No.	Komponen (intervensi yang dibutuhkan untuk memenuhi kinerja yang diperjanjikan): Koordinasi dan Pembinaan Penyusunan Dokumen Penganggaran KLHK			
	1. Penyusunan bahan koordinasi dan penataan penyusunan anggaran APBN dan APBN-P, serta penyiapan bahan koordinasi penelitian anggaran bidang KSDAE, PKTL, PHLHK, dan bidang PPI 2. Penyusunan bahan koordinasi dan penataan penyusunan anggaran Dekonsentrasi, serta penyiapan bahan koordnasi penelitian anggaran bidang PDASHL, PSLB3, PPKL, dan PSKL 3. Penyusunan bahan koordinasi dan penataan penyusunan anggaran Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan, serta penyiapan bahan koordinasi penelitian anggaran bidang PHPL, Litbang dan Inovasi, P2SDM, Inspektorat Jenderal dan bidang Sekretariat Jenderal. Dari Anggaran Rp. 3,485 Milyar, Bagian Rencana dan Program telah merealisasikan sebesar Rp. 3,470 M atau 99,57%			

BAGIAN EVALUASI

NO	UNIT KERJA	KINERJAN YANG DIPERJANJIKAN	CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA
III	Bagian Evaluasi	1. Nilai pelaporan kinerja, 12 poin 2. Nilai evaluasi kinerja, 8 poin 3. Jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi AKIP, 14 dokumen 4. Tingkat kepuasan layanan evaluasi dan laporan kinerja Pembangunan KLHK, 4 poin	11,36 Poin 7,21 Poin 22 Dokumen 4 Poin	94,67% 90,12% 157,14% 100%
No.	Komponen (intervensi yang dibutuhkan untuk memenuhi kinerja yang diperjanjikan): Koordinasi dan Pembinaan Penyusunan Evaluasi Laporan Kinerja Pembangunan KLHK			
	1. Penyusunan bahan koordinasi evaluasi kinerja dan pelaporan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan, serta penyiapan koordinasi penelaahan laporan pelaksanaan pembangunan bidang KSDAE, PKTL, PHLHK, dan bidang PPI, serta penyusunan bahan pidato kenegaraan, laporan siding cabinet dan rakor pimpinan bidang perekonomian. 2. Penyusunan bahan koordinasi evaluasi kinerja dan pelaporan program anggaran (APBN dan Transfer Daerah), penyiapan koordinasi penelaahan laporan pelaksanaan pembangunan bidang PDASHL, PSLB3, PPKL, PSKL, serta koordinasi penyusunan laporan kementerian dan rakor pimpinan bidang pembangunan manusia 3. Penyusunan bahan koordinasi evaluasi kinerja dan pelaporan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan dan program anggaran Sekretariat Jenderal dan penyiapan bahan koordinasi evaluasi kinerja dan pelaporan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan dan program anggaran Biro, serta penyiapan koordinasi penelaahan laporan pelaksanaan pembangunan bidang PHPL, Litbang dan Inovasi, P2SDM, Inspektorat Jenderal, dan bidang Sekretariat Jenderal, serta koordinasi penyusunan evaluasi agenda program nasional dan rakor pimpinan bidang politik, hukum, keamanan dan kemaritiman Dari Anggaran Rp. 2,113 Miliar, Bagian Rencana dan Program telah merealisasikan sebesar Rp. 2,111 M atau 99,95%			

BAGIAN KDNH

NO	UNIT KERJA	KINERJA YANG DIPERJANJIKAN	CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA
IV	Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hibah	1. Tingkat kepuasan layanan perencanaan Kerjasama Dalam Negeri dan Hibah yang mendukung RENSTRA KLHK, 4 poin 2. Presentasi Kerjasama Dalam Negeri yang sesuai dengan RENSTRA KLHK, 100 % 3. Presentasi Kerjasama Hibah yang sesuai dengan RENSTRA KLHK, 100 % 4. Tingkat kepuasan internal layanan ketatausahaan Biro Perencanaan, 4 poin	3,8 Poin 100% 100% 2,8 Poin	95% 100% 100% 72,5%
No.	Komponen (intervensi yang dibutuhkan untuk memenuhi kinerja yang diperjanjikan): Koordinasi dan Pembinaan Penyusunan Dokumen Kerjasama Dalam Negeri dan Hibah KLHK			
	1. Penyusunan bahan koordinasi kerjasama dalam negeri dan lintas sektoral 2. Penyusunan bahan koordinasi perencanaan, register, penganggaran, dan monitoring pengelolaan hibah dalam negeri dan luar negeri 3. Pengelolaan urusan ketatausahaanm kerumahtangaan, kepegawaian dan pelaporan Biro Dari Anggaran Rp. 2,022 Miliar, Bagian Rencana dan Program telah merealisasikan sebesar Rp. 2,012 M atau 99,52%			

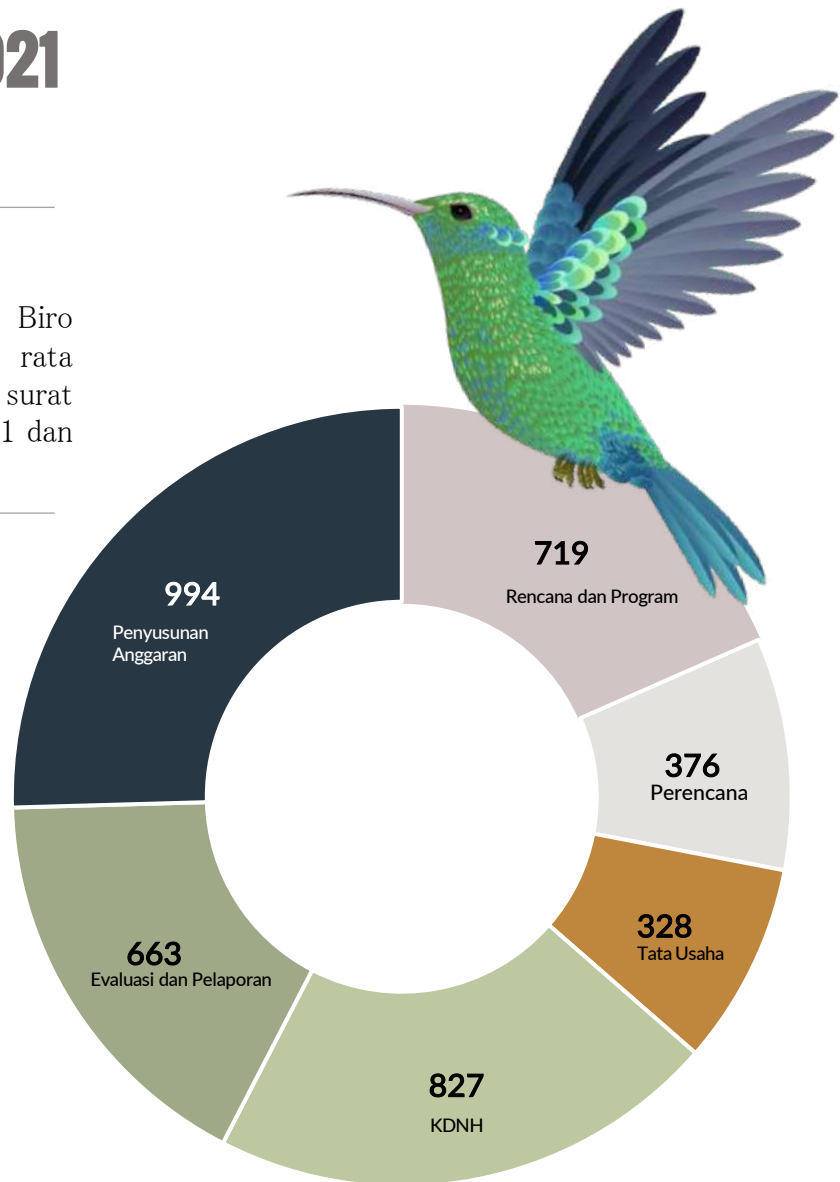
PROFIL SURAT MASUK BIRO PERENCANAAN 2021

3.907

surat masuk yang diterima oleh Biro Perencanaan dalam 11 bulan, atau rata-rata 365 surat per bulan. Sebagai perbandingan surat masuk pada Pusat Keteknikan sebanyak 391 dan pada biro Keuangan sebanyak 1.579.

Catatan :

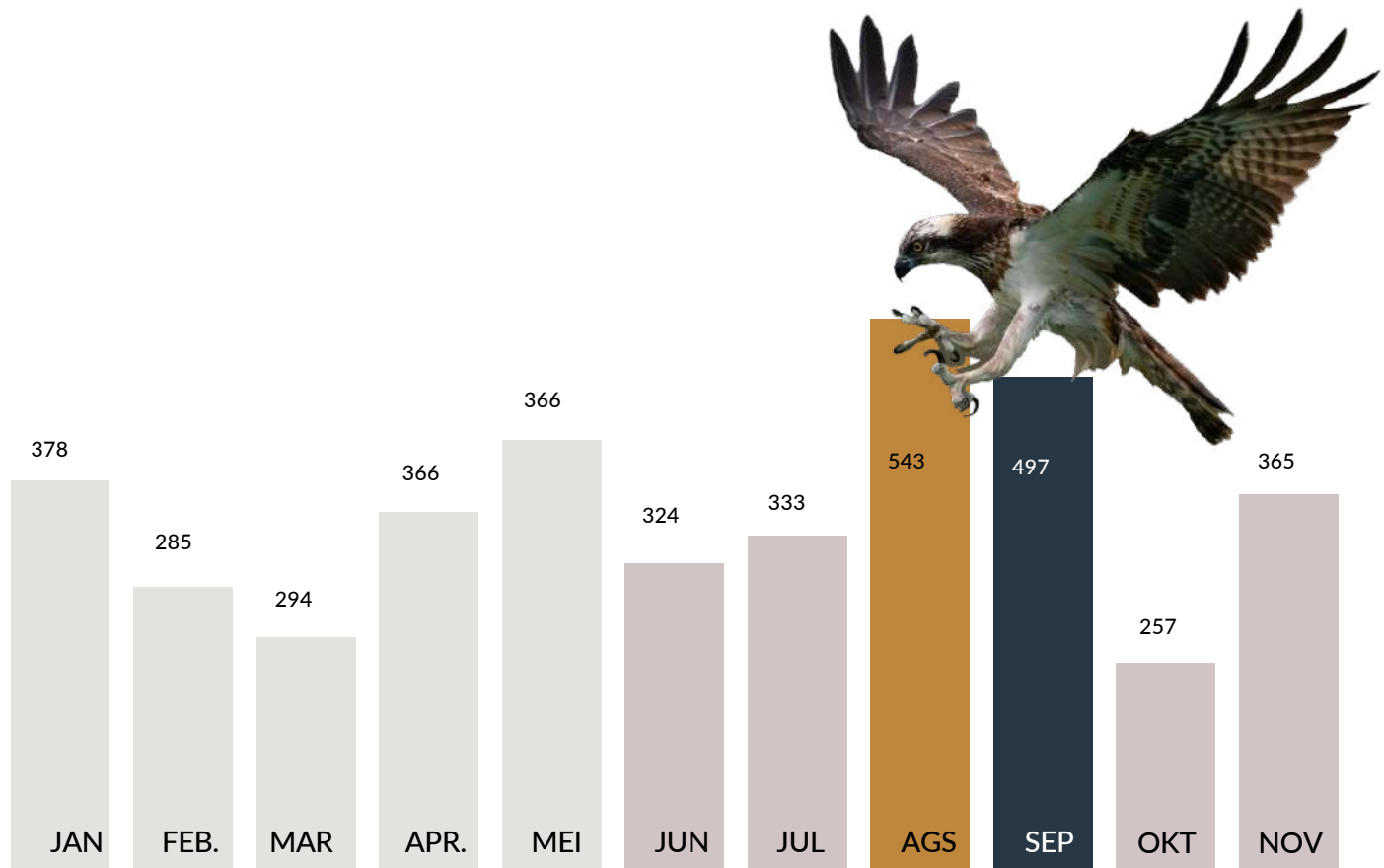
Surat masuk belum termasuk dengan undangan dan Surat dinas Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas tingkat Menteri



Sebaran disposisi surat
Biro Perencanaan

SEBARAN SURAT PER BULAN TA 2021

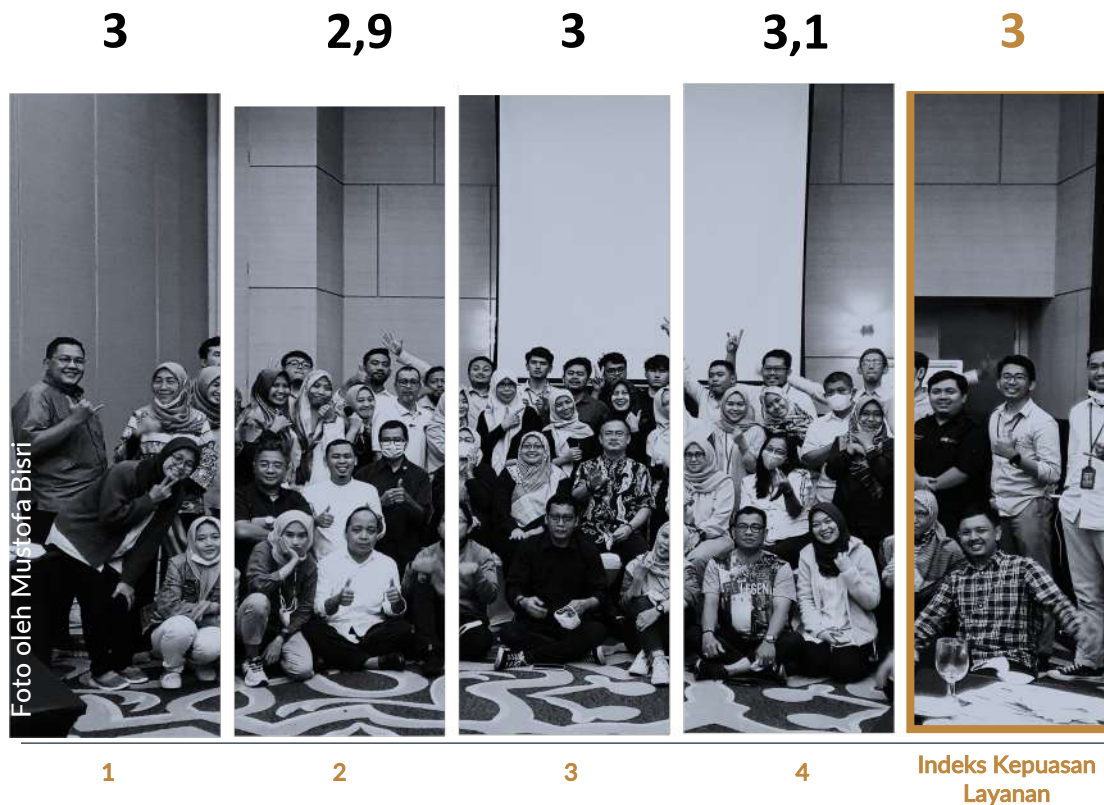
BIRO PERENCANAAN



Periode penting bagi Biro Perencanaan nampaknya jatuh pada bulan Mei dan Agustus. Proses Perencanaan dan Penganggaran mengisahkan bahwa pada bulan Mei dan Agustus lazimnya adalah pembahasan pagu indikatif dan pagu anggaran.

Bagaimana ke depan? Profil ini sepertinya menetengahkan penggunaan sumberdaya manusia yang akhirnya harus disesuaikan dengan kesibukan Biro Perencanaan.

INDEKS KEPUASAN LAYANAN KETATAUSAHAAN TA 2021



Tingkat kepuasan layanan internal Biro Perencanaan dibentuk dari 4 komponen yaitu masing-masing (1) pengelolaan ketatausahaan bidang kepegawaian lingkup Biro Perencanaan, (2) pengelolaan ketatausahaan bidang keuangan lingkup Biro Perencanaan, (3) pengelolaan ketatausahaan bidang barang milik negara (BMN) lingkup Biro Perencanaan, (4) pengelolaan ketatausahaan bidang persuratan dan kearsipan lingkup Biro Perencanaan, yang dinilai menggunakan skala likert 1-5 (sangat tidak puas-sangat puas) dan responden merupakan seluruh pegawai Biro Perencanaan.

Indeks kepuasan layanan internal biro perencanaan pada tahun 2020 bernilai 3,05 poin (netral) dari target sebesar 4 poin dengan capaian kinerja 76,25%. Sedangkan hasil penilaian TA 2021 sebesar 3 poin dengan capaian kinerja sebesar 75%. Sehingga, layanan kepuasan ketatausahaan dari tahun 2020-2021 memiliki YoY ▼ sebesar -1,6%.



**Foto oleh Marwedhi Nurratyo
Melukis Slide Dengan Hati**

Terselenggaranya lokatlatih pelatihan dasar-dasar fotografi untuk Biro Perencanaan. Salah satunya adalah teknik pengambilan gambar secara long exposure, yaitu teknik fotografi yang mengkombinasikan antara Objek Diam dengan Objek yang Bergerak ditambah dengan menggunakan **Shutter-Speed** yang lambat untuk mendapatkan efek pergerakan (atau jejak) dari benda yang bergerak. Diharapkan setelah adanya pelatihan ini, peserta semakin andal dalam melukis cahaya.



**Foto oleh Dokumentasi Biro Perencanaan
Malam Keakraban Biro Perencanaan**

Memupuk silaturahmi dan kebersamaan dalam meningkatkan kinerja dalam tim.



Foto oleh Anny Meilani

Mangrove, Bali

Menyusuri track hutan mangrove, sebagai destinasi wisata konservasi di pulau dewata juga sebagai kawasan hijau yang berfaedah menahan gelombang pasang untuk menjaga dari pengikisan dan abrasi



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

